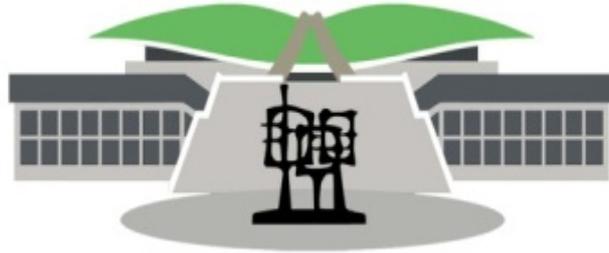


SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

AUDITED



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
*AUDITED***

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal
Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta Pusat

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TA 2017 *Audited* ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2018

Sekretaris Jenderal,



MA'RUF CAHYONO, S.H.,M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW	viii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. Laporan Realisasi Anggaran (<i>Face</i>)	5
II. Neraca (<i>Face</i>)	6
III. Laporan Operasional (<i>Face</i>)	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas (<i>Face</i>)	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	9
A.2. Kebijakan Teknis MPR	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja Negara	29
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	39
C.2. Aset Tetap	47
C.3. Piutang Jangka Panjang	64
C.4. Aset Lainnya	66
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	70
C.6. Ekuitas	73
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	75
D.2. Beban Pegawai	76
D.3. Beban Persediaan	78
D.4. Beban Barang dan Jasa	79
D.5. Beban Pemeliharaan	81
D.6. Beban Perjalanan Dinas	83
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	84
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	85
D.9. Beban Peyisihan Piutang Tak Tertagih	89
D.10. Kegiatan Non Operasional	90
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	92
E.2. Surplus(Defisit)-LO	92
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	92
E.4. Transaksi Antar Entitas	93
E.5. Ekuitas Akhir	94
F. Pengungkapan Penting Lainnya	
F.1. Aset Bersejarah	95
F.2. Rekening Pemerintah	95
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	95
VI. Lampiran dan Daftar	

Tabel	1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	2
Tabel	2	Ringkasan Neraca TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	2
Tabel	3	Ringkasan Laporan Operasional TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	3
Tabel	4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	4
Tabel	5	Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	16
Tabel	6	Penggolongan Kualitas Piutang	20
Tabel	7	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel	8	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	24
Tabel	9	Rincian Estimasi Realisasi Pendapatan TA 2017.....	28
Tabel	10	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	27
Tabel	11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017 menurut Program	31
Tabel	12	Rincian Realisasi Belanja Menurut Kegiatan TA 2017	31
Tabel	13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2017	32
Tabel	14	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	33
Tabel	15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 (Neto)	32
Tabel	16	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	34
Tabel	17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2017 (Neto)	35
Tabel	18	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i> (Neto)	36
Tabel	19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2017 (Neto)	37
Tabel	20	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	38
Tabel	21	Rincian Aset Lancar per 31 Des 2017 <i>Audited</i> dan Per 31 Des 2016 <i>Audited</i>	39
Tabel	22	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per-Eselon I.....	40
Tabel	23	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Tabel	24	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Des 2017 <i>Audited</i> dan Per 31 Des 2016 <i>Audited</i>	41
Tabel	25	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per-Eselon I	41
Tabel	26	Penyetoran Saldo per 31 Desember 2017 ke Kas Negara	42
Tabel	27	Rincian Piutang Bukan Pajak per-Eselon I	43

Tabel 28	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per-Eselon I	44
Tabel 29	Rincian Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I	44
Tabel 30	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	45
Tabel 31	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per Eselon I	46
Tabel 32	Rincian Persediaan per-Eselon I	46
Tabel 33	Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 <i>Audited</i> dan Per 31 Des 2016 <i>Audited</i>	46
Tabel 34	Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2017	48
Tabel 35	Perbandingan Aset Tetap per 31 Des 2017 <i>Audited</i> dan Per 31 Des 2016 <i>Audited</i>	49
Tabel 36	Rincian Aset Tetap per-Eselon I	49
Tabel 37	Rincian Tanah	51
Tabel 38	Rincian Tanah per-Eselon I	52
Tabel 39	Rincian Peralatan dan Mesin per-Eselon I	53
Tabel 40	Rincian Gedung dan Bangunan per-Eselon I	56
Tabel 41	Rincian Gedung dan Bangunan	56
Tabel 42	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per-Eselon I	59
Tabel 43	Rincian Aset Tetap Lainnya per-Eselon I	60
Tabel 44	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	63
Tabel 45	Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I	64
Tabel 46	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	65
Tabel 47	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I	66
Tabel 48	Rincian Aset Lainnya per-Eselon I	66
Tabel 49	Rincian Aset Tak Berwujud	67
Tabel 50	Rincian Aset Tak Berwujud per-Eselon I	67
Tabel 51	Rincian Aset Lain-lain per-Eselon I	69
Tabel 52	Rincian Aset Lain-lain	69
Tabel 53	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	70
Tabel 54	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	71
Tabel 55	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per-Eselon I	71
Tabel 56	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per-Eselon I	71

Tabel 57	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017	72
Tabel 58	Rincian Pendapatan Diterima di Muka per-Eselon I	72
Tabel 59	Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 <i>Audited</i> ..	72
Tabel 60	Rincian Uang Muka dari KPPN per-Eselon I	73
Tabel 61	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	73
Tabel 62	Rincian Ekuitas per-Eselon I	74
Tabel 63	Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	76
Tabel 64	Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	78
Tabel 65	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	79
Tabel 66	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	82
Tabel 67	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	84
Tabel 68	Perbandingan Rincian Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	85
Tabel 69	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	88
Tabel 70	Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	89
Tabel 71	Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 <i>Audited</i>	90
Tabel 72	Rincian Transaksi Antar Entitas	94

Grafik	1	Komposisi Realisasi Pendapatan menurut ikhtisar MAP Untuk Periode TA 2017 <i>Audited</i> dan TA 2016 Audited	30
Grafik	2	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017 (Neto)	32



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta Pusat

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan TA 2017 *Audited* Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini terdiri dari: (a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

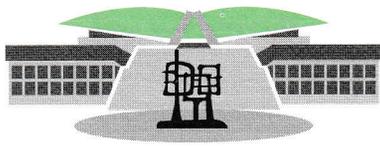
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2018

Sekretaris Jenderal,



MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website : mpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 *AUDITED***

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk tahun anggaran 2017 *Audited* berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen MPR RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 20 April 2018

Ketua

Tim Reviu Laporan Keuangan,


SURYANI, S.H
NIP. 19590126 1988022001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TA 2017 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode sampai dengan TA 2017 yaitu berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.069.761.827,- dari anggaran Rp0,-.

Realisasi Belanja untuk periode sampai dengan TA 2017 yaitu sebesar Rp814.472.209.760,- atau mencapai 90,22 persen dari anggarannya sebesar Rp902.803.014.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk transaksi sampai dengan TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited* disajikan sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited*

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2017 <i>Audited</i>			TA 2016 <i>Audited</i>
	Anggaran	Realisasi	% Real thd. Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	Rp 0	Rp 4.069.761.827	0,00	Rp 2.422.962.207
Belanja Negara	Rp 902.803.014.000	Rp 814.472.209.760	90,22	Rp 734.881.464.333

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited*.

Nilai Aset TA 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp628.971.177.758,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.094.087.771,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp609.171.158.042,-, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp107.858.471,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp11.598.073.474,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp675.989.640,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp628.295.188.118,-. Ringkasan Neraca TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited*

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2017 <i>Audited</i>	TA 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	8.094.087.771	20.018.539.412	(11.924.451.641)	(59,57)
Aset Tetap	609.171.158.042	608.001.741.491	1.169.416.551	0,19
Piutang Jangka Panjang	107.858.471	0	107.858.471	0,00
Aset Lainnya	11.598.073.474	10.929.090.544	668.982.930	6,12
Jumlah Aset	628.971.177.758	638.949.371.447	(9.978.193.689)	(1,56)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	675.989.640	9.598.773.643	(8.922.784.003)	(92,96)
Jumlah Kewajiban	675.989.640	9.598.773.643	(8.922.784.003)	(92,96)
EKUITAS				
Ekuitas	628.295.188.118	629.350.597.804	(1.055.409.686)	(0,17)
Jumlah Ekuitas	628.295.188.118	629.350.597.804	(1.055.409.686)	(0,17)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	628.971.177.758	638.949.371.447	(9.978.193.689)	(1,56)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. (Defisit)-LO per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp(811.449.529.829,-) dan Rp(743.418.206.852,-), dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional TA 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp(812.969.433.625,-), yang diperoleh dari nilai Pendapatan sebesar Rp150.623.753,- dan nilai Beban Operasional sebesar Rp813.120.057.378,-

Nilai Surplus(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional TA 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.519.903.796,-

Nilai Surplus(Defisit) dari Pos Luar Biasa TA 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,-

Ringkasan Surplus(Defisit)-LO TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited*

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2017 <i>Audited</i>	TA 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	150.623.753	150.623.753	0	0,00
Beban Operasional	813.120.057.378	746.770.144.957	66.349.912.421	8,88
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(812.969.433.625)	(746.619.521.204)	(66.349.912.421)	8,89
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	100.159.000	(100.159.000)	0,00
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.519.903.796	3.101.155.352	(1.581.251.556)	(50,99)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.519.903.796	3.201.314.352	(1.681.410.556)	(52,52)
POS LUAR BIASA	0	0		
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0,00
SURPLUS (DEFISIT) - LO	(811.449.529.829)	(743.418.206.852)	(68.031.322.977)	9,15

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp629.350.597.804,-. Surplus/(Defisit)-LO *Audited* sebesar Rp(811.449.529.829,-), Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas

Rp8.327.790,- Transaksi Antar Entitas senilai total Rp810.402.447.933,- sehingga ekuitas entitas pada TA 2017 *Audited* adalah senilai Rp628.295.188.118,-

Tabel 4

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited*

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2017 <i>Audited</i>	TA 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
EKUITAS AWAL	629.350.597.804	395.087.857.991	234.262.739.813	59,29
SURPLUS (DEFISIT) - LO	(811.449.529.829)	(743.418.206.852)	(68.031.322.977)	9,15
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(8.327.790)	245.222.444.539	(245.230.772.329)	(100,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	810.402.447.933	732.458.502.126	77.943.945.807	10,64
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.055.409.686)	234.262.739.813	(235.318.149.499)	(100,45)
EKUITAS AKHIR	628.295.188.118	629.350.597.804	(1.055.409.686)	(0,17)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran periode TA 2017 *Audited* disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(FACE REPORT)



LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN /LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31DESEMBER 2017 *AUDITED* DAN TA 2016 *AUDITED*
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

URAIAN	CATATAN	TA 2017 <i>Audited</i>				TA 2016 <i>Audited</i>			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH									
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	4,069,761,827	4,069,761,827	-	125,000,000	2,422,962,207	2,297,962,207	1,938.37
		-	4,069,761,827	4,069,761,827	-	125,000,000	2,422,962,207	2,297,962,207	1,938.37
BELANJA NEGARA									
BELANJA TRANSAKSI KAS		902,803,014,000	814,472,209,760	88,330,804,240	90.22	855,830,897,000	734,881,464,333	120,949,432,667	85.87
RUPIAH MURNI		902,803,014,000	814,472,209,760	88,330,804,240	90.22	855,830,897,000	734,881,464,333	120,949,432,667	85.87
Belanja Pegawai	B.2.1	85,201,687,000	76,902,513,750	8,299,173,250	90.26	78,234,275,000	69,571,399,330	8,662,875,670	88.93
Belanja Barang	B.2.2	796,965,108,000	717,920,867,132	79,044,240,868	90.08	768,720,302,000	656,807,502,045	111,912,799,955	85.44
Belanja Modal	B.2.3	20,636,219,000	19,648,828,878	987,390,122	95.22	8,876,320,000	8,502,562,958	373,757,042	95.79
		902,803,014,000	814,472,209,760	88,330,804,240	90.22	855,830,897,000	734,881,464,333	120,949,432,667	85.87

Jakarta, 10 April 2018
 Sekretaris Jenderal,



MA RUF CAHYONO, S.H.,M.H.
 NIP. 19670429 199503 1 001

NERACA

(FACE REPORT)



NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2017 AUDITED DAN 2016 AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	4,394,113	4,636,093,012	(4,631,698,899)	(99.91)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	267,468,248	7,638,247,801	(7,370,779,553)	(96.50)
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	0	9,090,909	(9,090,909)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	(45,455)	45,455	0.00
<i>Piutang Bukan Pajak (Neto)</i>		0	9,045,454	(9,045,454)	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	340,360,952	0	340,360,952	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	(1,701,805)	0	(1,701,805)	0.00
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</i>		338,659,147	0	338,659,147	0.00
Persediaan	C.1.7	7,483,566,263	7,735,153,145	(251,586,882)	(3.25)
JUMLAH ASET LANCAR		8,094,087,771	20,018,539,412	(11,924,451,641)	(59.57)
ASET TETAP					
Tanah	C.2.1	343,728,232,605	343,728,232,605	0	0.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	148,831,544,599	139,263,126,534	9,568,418,065	6.87
Gedung dan Bangunan	C.2.3	207,005,054,808	203,328,496,465	3,676,558,343	1.81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	13,646,277,700	13,646,277,700	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	66,451,125,475	60,618,883,915	5,832,241,560	9.62
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(170,491,077,145)	(152,583,275,728)	(17,907,801,417)	11.74
JUMLAH ASET TETAP		609,171,158,042	608,001,741,491	1,169,416,551	0.19
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	108,400,474	0	108,400,474	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	(542,003)	0	(542,003)	-
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>		107,858,471	0	107,858,471	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		107,858,471	0	107,858,471	0.00
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.4.1	2,048,944,540	1,246,944,540	802,000,000	64.32
Aset Lain-lain	C.4.2	12,093,595,400	12,093,595,400	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(2,544,466,466)	(2,411,449,396)	(133,017,070)	5.52
JUMLAH ASET LAINNYA		11,598,073,474	10,929,090,544	668,982,930	6.12
JUMLAH ASET		628,971,177,758	638,949,371,447	(9,978,193,689)	(1.56)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	406,765,290	2,578,806,837	(2,172,041,547)	(84.23)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.2	135,416,000	0	135,416,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	4,394,113	4,636,093,012	(4,631,698,899)	(99.91)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	129,414,237	2,383,873,794	(2,254,459,557)	(94.57)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		675,989,640	9,598,773,643	(8,922,784,003)	(92.96)
JUMLAH KEWAJIBAN		675,989,640	9,598,773,643	(8,922,784,003)	(92.96)
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	C.6	628,295,188,118	629,350,597,804	(1,055,409,686)	(0.17)
JUMLAH EKUITAS		628,295,188,118	629,350,597,804	(1,055,409,686)	(0.17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		628,971,177,758	638,949,371,447	-9,978,193,689	(1.56)

Jakarta, 20 April 2018
Sekretaris Jenderal,


MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 196704291995031001

LAPORAN OPERASIONAL

(FACE REPORT)



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 AUDITED DAN 2016 AUDITED
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN	
		TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	150,623,753	150,623,753	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		150,623,753	150,623,753	0	0.00
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	77,018,138,182	70,912,223,905	6,105,914,277	8.61
Beban Persediaan	D.3	41,880,342,459	27,198,396,646	14,681,945,813	53.98
Beban Barang dan Jasa	D.4	343,797,915,573	314,231,819,382	29,566,096,191	9.41
Beban Pemeliharaan	D.5	16,489,583,702	15,709,824,294	779,759,408	4.96
Beban Perjalanan Dinas	D.6	315,661,184,182	296,886,436,401	18,774,747,781	6.32
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	228,958,730	3,366,919,787	(3,137,961,057)	(93.20)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	18,041,736,197	18,464,479,087	(422,742,890)	(2.29)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	2,198,353	45,455	2,152,898	4,736.33
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		813,120,057,378	746,770,144,957	66,349,912,421	8.88
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(812,969,433,625)	(746,619,521,204)	(66,349,912,421)	8.89
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0	100,159,000	(100,159,000)	0.00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	100,159,000	(100,159,000)	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0	0	0.00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0.00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,519,903,796	3,101,155,352	(1,581,251,556)	(50.99)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,579,866,259	3,132,922,288	(1,553,056,029)	(49.57)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		59,962,463	31,766,936	28,195,527	88.76
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,519,903,796	3,201,314,352	(1,681,410,556)	(52.52)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(811,449,529,829)	(743,418,206,852)	(68,031,322,977)	9.15
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa		0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(811,449,529,829)	(743,418,206,852)	(68,031,322,977)	9.15

Jakarta, 20 April 2018
 Sekretaris Jenderal,



MA RUF CAHYONO, S.H., M.H.
 NIP. 19670429 199503 1 001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(FACE REPORT)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 AUDITED DAN 2016 AUDITED
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	629,350,597,804	395,087,857,991	234,262,739,813	59.29
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(811,449,529,829)	(743,418,206,852)	(68,031,322,977)	9.15
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(8,327,790)	245,222,444,539	(245,230,772,329)	(100.00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	24,878,442	(24,878,442)	(100.00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	(8,327,790)	245,197,566,097	(245,205,893,887)	(100.00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	810,402,447,933	732,458,502,126	77,943,945,807	10.64
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,055,409,686)	234,262,739,813	(235,318,149,499)	(100.45)
EKUITAS AKHIR	E.5	628,295,188,118	629,350,597,804	(1,055,409,686)	(0.17)

Jakarta, 20 April 2018
 Sekretaris Jenderal,

MARIF CAHYONO, S.H., M.H.
 NIP. 19670429-199503 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN *(CaLK)*



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 270/PMK.05/2014
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS MPR

A.2.1. Rencana Strategis

**Kebijakan
Teknis MPR**

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Salah satu perubahan penting setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR.

Wewenang MPR adalah:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden tersebut meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Tugas MPR adalah:

- a. Memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Pimpinan MPR.

Sekretariat Jenderal MPR memiliki visi “Penggerak utama Reformasi Birokrasi dalam memberikan layanan internal kepada MPR dan alat kelengkapannya serta meningkatkan kualitas layanan publik MPR”.

Misi Sekretariat Jenderal MPR adalah:

1. Memberikan layanan prima kepada MPR dan alat kelengkapannya dalam melaksanakan tugas konstitusi;
2. Melaksanakan reformasi birokrasi Setjen MPR secara konsisten dan berkesinambungan.

Tujuan Sekretariat Jenderal MPR:

1. Terwujudnya layanan internal yang profesional, proaktif, serta sesuai dengan kebutuhan MPR;
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, serta akuntabel dengan layanan publik berkualitas.

Guna mengukur tujuan strategis Sekretariat Jenderal MPR diperlukan sejumlah sasaran program. 12 Sasaran Program (SP) Setjen MPR RI yang ingin dicapai hingga tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

1. SP1. Meningkatnya kepuasan MPR dan alat kelengkapannya terhadap layanan internal Setjen MPR;
2. SP2. Terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi Setjen MPR;
3. SP3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik MPR;
4. SP4. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan Setjen MPR.
5. SP5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sidang MPR;
6. SP6. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian sistem ketatanegaraan;

7. SP7. Terselenggaranya dukungan pelaksanaan sosialisasi konstitusi secara efektif dan efisien;
8. SP8. Terselenggaranya pengelolaan aspirasi masyarakat secara komprehensif;
9. SP9. Optimalisasi implementasi e-Gov Setjen MPR;
- 10.SP10. Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Setjen MPR;
- 11.SP11. Meningkatnya kualitas layanan publik Setjen MPR;
- 12.SP12. Meningkatnya pelaksanaan roadmap RB di lingkungan Setjen MPR RI berbasis TIK.

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal MPR tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI dan ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2015

Sekretariat Jenderal MPR mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif, kepada MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal MPR menyelenggarakan fungsi:

- a. Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat kelengkapan majelis, dan fraksi/kelompok anggota MPR;
- b. Membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;
- c. Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan redaksi/teknis yuridis dari Rancangan-

- rancangan/Ketetapan/Keputusan Majelis;
- d. Membantu Pimpinan Majelis untuk menyiapkan rancangan anggaran belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi/kelompok anggota;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;
 - g. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
 - h. Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan kesekretariatan Majelis;
 - i. Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta pelayanan kesehatan;
 - j. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Majelis.

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal MPR terdiri dari:

1. Biro Persidangan dan Sosialisasi;
2. Biro Sekretariat Pimpinan;
3. Biro Hubungan Masyarakat;
4. Biro Administrasi dan Pengawasan;
5. Biro Keuangan;
6. Biro Umum;
7. Biro Pengkajian.

A.2.2. Unit Akuntansi Instansi

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit

Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Sekretariat Jenderal MPR RI, maka dibentuk Unit Akuntansi Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI dan Unit Akuntansi Barang Sekretariat Jenderal MPR RI.

Unit Akuntansi Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1);
3. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

Unit Akuntansi Barang Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1);
3. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

Jumlah satuan kerja di lingkup MPR adalah 2 (dua) satuan kerja, yaitu satuan kerja Sekretariat Jenderal (000017), satuan kerja Majelis (000021). Dan satuan kerja Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (555001). Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan Laporan Keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 3 (tiga) satuan kerja (100%).

Satker Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan satker yang dibentuk berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan tertentu secara kebijakan akuntansinya harus disajikan di dalam LKKL namun tidak dapat dicatat dan disajikan pada laporan keuangan tingkat satker Setjen (000017) maupun satker Majelis (000021) dan untuk kemudian dikonsolidasikan menjadi LKKL melalui *upload* ADK ke Aplikasi e-Rekon&LK

Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Eselon	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	01	Sekretariat Jenderal	1	-	-	-	1
2	02	Majelis	1	-	-	-	1
3	55	Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	-	-	-	1
Jumlah			2	-	-	-	2

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

Laporan Keuangan TA 2017 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 BASIS AKUNTANSI

**Basis
Akuntansi**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan-LRA

**Pendapatan-
LRA**

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan

andal.

)Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

)Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau bagian lancar TPA

)Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

-) Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
-) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa Koleksi Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
-) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

**Penyusutan
Aset Tetap**

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode Garis Lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6 berikut ini;

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

-) Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

-) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
-) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
-) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
-) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

Kewajiban

) Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Keuangan TA 2017 *Audited* ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah MPR seperti Eselon I dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan serta mencakup atas seluruh transaksi keuangan yang dikelola MPR atau Bagian Anggaran 001 yang berasal dari dana APBN sebesar Rp902.803.014.000,- yang terdiri dari:

- a. Anggaran satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp147.252.084.000,- sesuai dengan DIPA-001.01.01.000017/ 2017 tanggal 7 Desember 2016, dan telah direvisi sebanyak 6 (enam) kali yaitu 1 (satu) kali revisi melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2 (dua) kali revisi melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan 3 (tiga) kali melalui revisi internal, disebabkan karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, revisi tersebut yaitu:
 - Revisi melalui kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu:
 1. Revisi DIPA ke-I, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-015/WPB.12/2016 tanggal 5 Januari 2017, revisi perubahan pada DIPA Petikan;
 - Revisi melalui Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu:
 1. Revisi DIPA ke-2, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-1715/AG/2017 tanggal 24 Agustus 2017, revisi perubahan/penghapusan catatan halaman IV DIPA ;
 2. Revisi DIPA ke-3, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-2365/AG/2017 tanggal 6 November 2017, revisi perubahan /penghapusan catatan halaman IV DIPA dan revisi antar kegiatan.
 - Revisi internal melalui kewenangan KPA, perihal Pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, yaitu:
 1. Revisi Internal ke-1, tanggal 13 Maret 2017;
 2. Revisi Internal ke-2, tanggal 28 November 2017;
 3. Revisi Internal ke-3, tanggal 29 Desember 2017.
- b. Anggaran satuan kerja Majelis sebesar Rp755.550.930.000,- sesuai dengan DIPA-001.02.1.000021/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan telah dilakukan revisi sebanyak 5 (lima) kali melalui Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dan 5 (lima) kali melalui revisi internal, disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

- Revisi dilakukan melalui kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
 1. Revisi DIPA ke-I, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-015/WPB.12/2016 tanggal 5 Januari 2017, perihal perubahan pada DIPA Petikan;
 2. Revisi DIPA ke-II, Surat Pengesahan Revisi DIPA No. S-1063/WPB.12/2017 tanggal 9 Maret 2017, perihal penambahan volume keluaran;
 3. Revisi DIPA ke-III, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-1986/WPB.12/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal penambahan volume keluaran;
 4. Revisi DIPA ke-IV, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-3332/WPB.12/2017 tanggal 29 September 2017, perihal penambahan volume keluaran;
 5. Revisi DIPA ke-V, Surat Pengesahan Revisi DIPA No.S-3934/WPB.12/2017 tanggal 8 November 2017, perihal penambahan volume keluaran.
- Revisi dilakukan melalui kewenangan KPA (Internal):
 1. Revisi Internal ke I, tanggal 14 Agustus 2017;
 2. Revisi Internal ke II, tanggal 27 Oktober 2017;
 3. Revisi Internal ke III, tanggal 30 November 2017;
 4. Revisi Internal ke IV, tanggal 13 Desember 2017;
 5. Revisi Internal ke V, tanggal 29 Desember 2017.

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

**Realisasi
Pendapatan
Rp4.069.761.827,-**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah MPR RI untuk periode berakhir 31 Desember 2017 *Audited* adalah sebesar Rp4.069.761.827,-, dengan estimasi pendapatan Rp.0,-. Seluruh penerimaan berasal dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2017

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2017		
		Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0	295.130.662	0,00
4239	Pendapatan Lain-lain	0	3.774.631.165	0,00
Jumlah		0	4.069.761.827	0,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir TA 2017 menunjukkan kenaikan sebesar 67,97 persen dibandingkan TA 2016 Audited. Kenaikan Pendapatan tersebut antara lain disebabkan karena adanya setoran atas Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara serta Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL. Perbandingan realisasi pendapatan TA 2017 dan 2016 tersaji dalam tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 Audited dan 2016 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	Naik (Turun) %
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	295.130.662	106.275.844	177,70
4239	Pendapatan Lain-lain	3.774.631.165	2.316.686.363	62,93
Jumlah Pendapatan		4.069.761.827	2.422.962.207	67,97

Adapun rincian realisasi Pendapatan TA 2017 di tingkat Eselon I adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kode	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)
1	Eselon I Sekretariat Jenderal			
	4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)		295.130.662
		423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	295.130.662
	4239	Pendapatan Lain-lain		411.758.596
		423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	267.791.144
		423951	Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	105.000.432
		423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	38.967.020
Jumlah				706.889.258

2	Eselon I Majelis		
	4239	Pendapatan Lain-lain	3.362.872.569
		423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
			187.195.324
		423952	Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL
			3.175.677.245
Jumlah			3.362.872.569
TOTAL			4.069.761.827

Rincian Pendapatan yang diperoleh MPR sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu:

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan sebesar Rp295.130.662,- bersumber dari:
 - Sewa atas rumah dinas pegawai di Komplek Cilandak dan Widya Chandra sebesar Rp6.116.844,-
 - Sewa atas ruang kantor BRI dan ruang ATM untuk sewa selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp270.832.000,-
 - Sewa ruang yang dipergunakan oleh Koperasi Pegawai MPR RI selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp18.181.818,-
2. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp3.774.631.165,- dapat dirinci sebagai berikut:
 - Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara sebesar Rp454.986.438,- , yang terdiri atas:

No	Uraian	Nilai Pengembalian
1	Penyelesaian TGR Non Bendahara satker 000017 (Setjen)	267.791.114
2	Penyelesaian TGR Non Bendahara satker 000021 (Majelis)	187.195.324
Total		454.986.438

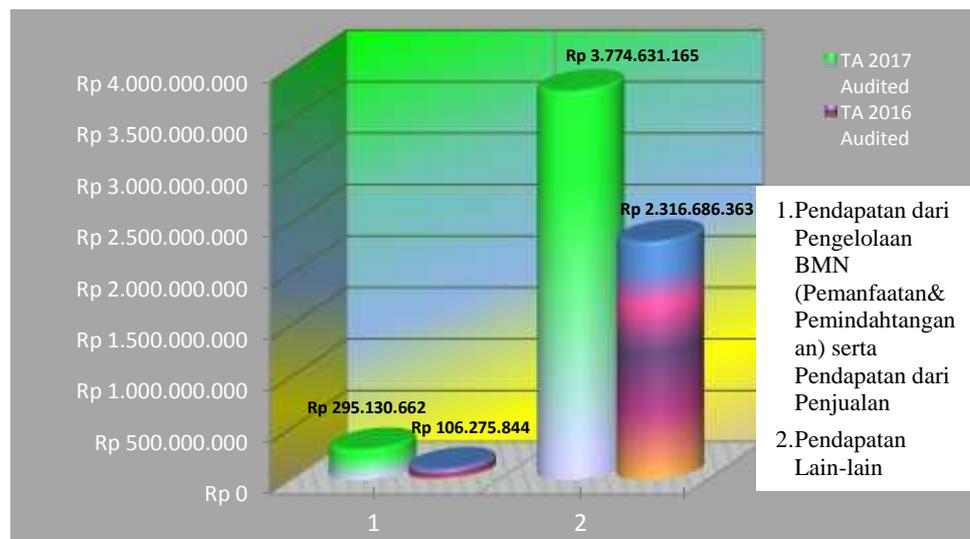
Penyelesaian TGR Non Bendahara ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.123A Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 72A22 tahun 2017 tentang Biaya Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

- Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp3.319.644.697,-.

No	Uraian	Nilai Pengembalian
1	Penerimaan kembali belanja TAYL satker 000017 (setjen)	143.967.452
	- Belanja Pegawai TAYL TA 2016	105.000.432
	- Belanja Barang TAYL TA 2016	38.967.020
2	Penerimaan kembali belanja TAYL satker 000021 (majelis)	3.175.677.245
	- Setoran Belanja Barang TAYL TA 2016	3.175.677.245
Total		3.319.644.697

Secara grafik, perbandingan realisasi Pendapatan menurut ikhtisar MAP (Mata Anggaran Pengeluaran) untuk TA 2017 Audited dan 2016 Audited adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Komposisi Realisasi Pendapatan menurut ikhtisar MAP TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited



B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara
Rp814.472.209.760,-

Realisasi belanja MPR untuk periode yang berakhir TA 2017 adalah sebesar Rp814.472.209.760,- atau sebesar 90,22 persen dari anggarannya sebesar Rp.902.803.014.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran dan Realisasi Belanja dari 1 Januari 2017 sampai dengan TA 2017 menurut program tersaji pada Tabel 11

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017 menurut Program

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi TA 2017	% Realisasi
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	100.077.428.000	85.256.949.339	85,19
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	47.174.656.000	44.463.954.315	94,25
06	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	755.550.930.000	684.751.306.106	90,63
Jumlah		902.803.014.000	814.472.209.760	90,22

Dari tiga program pada tabel di atas, rincian realisasi belanja menurut kegiatan sampai dengan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel 12

Tabel 12
Rincian Realisasi Belanja menurut Kegiatan TA 2017

(Dalam Rupiah)

Prog	Keg	Komp	Uraian	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam Rupiah)	% Realisasi Anggaran
01			PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MPR	100.077.428.000	85.256.949.339	85,19
	1001		Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	21.891.482.000	18.569.867.005	84,83
		001	Dokumen Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	12.664.043.000	10.319.467.413	81,49
		994	Layanan Perkantoran	9.227.439.000	8.250.399.592	89,41
	1002		Penyelenggaraan Kehumasan	5.830.520.000	5.105.251.509	87,56
		001	Layanan Kehumasan MPR dan Sekretariat Jenderal	3.223.400.000	2.766.338.892	85,82
		994	Layanan Perkantoran	2.607.120.000	2.338.912.617	89,71
	1003		Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	65.895.609.000	57.933.212.818	87,92
		001	Dokumen Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	2.945.902.000	2.214.587.718	75,18
		994	Layanan Perkantoran	62.949.707.000	55.718.625.100	88,51
	1004		Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya	1.119.120.000	747.884.755	66,83
		001	Layanan Sidang MPR dan Alat Kelengkapannya	1.119.120.000	747.884.755	66,83
	1005		Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Pimpinan	4.336.441.000	2.343.803.491	54,05
		001	Layanan Tugas Kesekretariatan Pimpinan MPR	4.336.441.000	2.343.803.491	54,05
	1006		Dukungan Pengkajian Kemajelis	1.004.256.000	556.929.761	55,46
		001	Laporan Hasil Kajian	1.004.256.000	556.929.761	55,46
02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MPR	47.174.656.000	44.463.954.315	94,25
	1007		Pembangunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	47.174.656.000	44.463.954.315	94,25
		001	Dukungan Pengelolaan Administrasi Barang Kekayaan Milik Negara	2.773.960.000	2.499.721.358	90,11
		951	Layanan Internal (Overhead)	19.145.619.000	18.228.166.506	95,21
		994	Layanan Perkantoran	25.255.077.000	23.736.066.451	93,99

06		PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS KONSTITUSIONAL MPR DAN ALAT KELENGKAPANNYA	755.550.930.000	684.751.306.106	90,63
	1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	46.474.103.000	37.127.840.919	79,89
		001 Kegiatan Pimpinan MPR	46.474.103.000	37.127.840.919	79,89
	5001	Pelaksanaan Kegiatan Publikasi/Peliputan	58.166.346.000	47.114.902.347	81,00
		001 Publikasi Kegiatan MPR	58.166.346.000	47.114.902.347	81,00
	5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	426.218.694.000	398.072.667.091	93,40
		001 Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR	426.218.694.000	398.072.667.091	93,40
	5003	Pengkajian Kemajelis	164.245.315.000	146.743.742.352	89,34
		001 Hasil Kajian dan Aspirasi Masyarakat	134.259.135.000	120.709.829.106	89,91
		002 Rekomendasi Kajian	29.986.180.000	26.033.913.246	86,82
	5004	Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	33.601.710.000	30.428.454.849	90,56
		994 Layanan Perkantoran	33.601.710.000	30.428.454.849	90,56
	5728	Penganggaran MPR RI	26.844.762.000	25.263.698.548	94,11
		001 Kegiatan Badan Penganggaran MPR RI	26.844.762.000	25.263.698.548	94,11

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

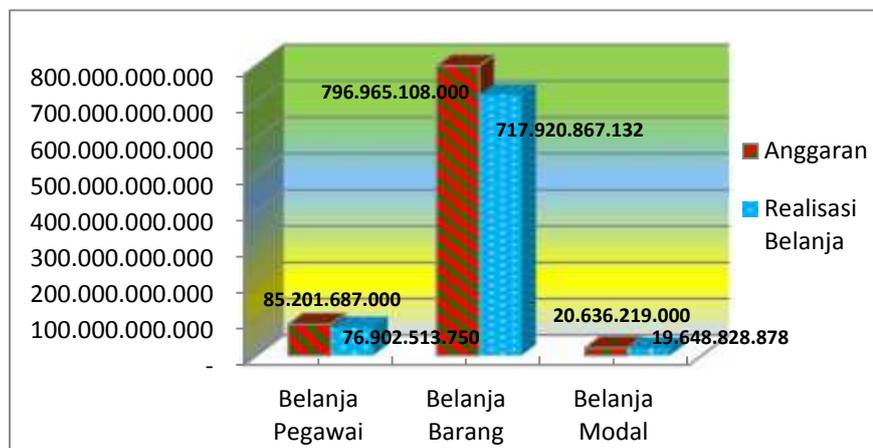
Tabel13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	85.201.687.000	77.096.900.250	90,49
Belanja Barang	796.965.108.000	729.252.177.427	91,50
Belanja Modal	20.636.219.000	19.648.828.878	95,22
Total Belanja Bruto	902.803.014.000	825.997.906.555	91,49
Pengembalian Belanja Pegawai	0	194.386.500	0,00
Pengembalian Belanja Barang	0	11.331.310.295	0,00
Total Pengembalian Belanja	0	11.525.696.795	
Total Belanja Neto	902.803.014.000	814.472.209.760	90,22

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 2 berikut ini:

Grafik 2: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017 (Neto)



Realisasi Belanja untuk periode TA 2017 ini mengalami kenaikan sebesar 10,83 persen dibandingkan dengan posisi TA 2016 Audited. Perbandingan realisasi belanja antara periode yang berakhir TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited tersaji pada tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi		Naik (Trurun) %
		TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	
51	Belanja Pegawai	Rp 76.902.513.750	Rp 69.571.399.330	10,54
52	Belanja Barang	Rp 717.920.867.132	Rp 656.807.502.045	9,30
53	Belanja Modal	Rp 19.648.828.878	Rp 8.502.562.958	131,09
Jumlah		Rp 814.472.209.760	Rp 734.881.464.333	10,83

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai
Rp76.902.513.750,-

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode berakhir TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited masing-masing adalah sebesar Rp76.902.513.750,- dan Rp69.571.399.330,-.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 (Neto)

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Pegawai	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi Belanja (dalam Rupiah)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.864.996.000	13.266.695.679	95,68
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	443.000	195.127	44,05
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.386.497.000	884.381.670	63,79
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	285.221.000	266.038.366	93,27
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.391.810.000	1.179.905.000	84,77
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	58.310.000	29.000.000	49,73
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	497.348.000	49.104.403	9,87
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	834.278.000	747.157.140	89,56
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.679.970.000	1.845.743.000	68,87
511147	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	48.876.000	0	0,00
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	593.320.000	527.084.310	88,84
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	343.392.000	329.280.000	95,89
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	6.000	1.680	28,00
511321	Belanja Tunj.Suami/Istri Pejabat Negara	34.338.000	30.576.000	89,04
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	13.735.000	9.828.000	71,55
511323	Belanja Tunj.Struktural Pejabat Negara	1.138.200.000	1.056.900.000	92,86
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	226.001.000	187.280.128	82,87
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	17.380.000	15.642.720	90,00
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	966.048.000	950.039.000	98,34
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	6.328.440.000	5.468.623.500	86,41
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara	140.000.000	130.000.000	92,86

511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	462.000.000	462.000.000	100,00
511337	Belanja Tunj.Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	90.000.000	0	0,00
512211	Belanja Uang Lembur	492.010.000	113.212.000	23,01
512411	Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	53.178.173.000	49.353.826.027	92,81
512412	Belanja Pegawai Transito	130.895.000	0	0,00
Jumlah		85.201.687.000	76.902.513.750	90,26

Perbandingan realisasi belanja pegawai antara periode yang berakhir TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Pegawai	Realisasi		Naik/ (Turun)% 6=(3-4)/4x100
		TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	
1	2	3	4	6=(3-4)/4x100
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.278.467.500	12.895.548.900	2,97
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	196.738	210.964	(6,74)
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	885.060.060	848.421.740	4,32
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	266.038.366	256.413.390	3,75
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.181.165.000	1.174.515.000	0,57
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.000.000	32.000.000	(9,38)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	49.104.403	151.799.231	(67,65)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	747.736.500	742.305.000	0,73
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.845.743.000	1.975.401.000	(6,56)
511147	Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	0	tidak terdapat realisasi
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	530.035.000	538.090.000	(1,50)
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	329.280.000	329.280.000	0,00
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	1.680	1.680	0,00
511321	Belanja Tunj.Suami/Istri Pejabat Negara	30.576.000	30.576.000	0,00
511322	Belanja Tunj.Anak Pejabat Negara	9.828.000	9.828.000	0,00
511323	Belanja Tunj.Struktural Pejabat Negara	1.056.900.000	1.056.900.000	0,00
511324	Belanja Tunj.PPh Pejabat Negara	187.280.128	187.280.128	0,00
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	15.642.720	15.642.720	0,00
511331	Belanja Tunj.Komunikasi Intensif Pejabat Negara	950.039.000	951.408.000	(0,14)
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	5.663.010.000	5.176.770.000	9,39
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara	130.000.000	130.000.000	0,00
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	462.000.000	440.000.000	5,00
511337	Belanja Tunj.Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara	0	0	tidak terdapat realisasi
512211	Belanja Uang Lembur	113.212.000	54.869.000	106,33
512411	Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	49.432.568.705	42.721.128.356	15,71
512412	Belanja Pegawai Transito	0	0	tidak terdapat realisasi
Realisasi Belanja Bruto		77.192.884.800	69.718.389.109	10,72
511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	(11.771.821)	(1.738.240)	577,23
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(1.611)	(1.385)	16,32
511121	Pengembalian Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	(678.390)	(3.596.514)	(81,14)
511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	(241.641)	(100,00)
511123	Pengembalian Belanja Tunj.Struktural PNS	(1.260.000)	(2.000.234)	(37,01)

511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	(579.360)	(1.520.820)	(61,90)
511151	Pengembalian Belanja Tunj.Umum PNS	(2.950.690)	(185.000)	1.494,97
511332	Pengembalian Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	(194.386.500)	(22.312.500)	771,20
512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	(78.742.678)	(115.393.445)	0,00
Pengembalian Belanja		(290.371.050)	(146.989.779)	97,55
Realisasi Belanja Neto		76.902.513.750	69.571.399.330	10,54

Hal ini berarti bila dibandingkan realisasi pada TA 2016 Audited, realiasi belanja pegawai pada TA 2017 Audited menunjukkan kenaikan sebesar Rp7.331.114.420,- atau sebesar 10,54 persen. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena kenaikan nilai Honorarium untuk tenaga Staff Ahli, serta adanya pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya untuk seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp717.920.867.132,-

Realisasi Belanja Barang antara periode TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp717.920.867.132,- dan Rp656.807.502.045,-.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2017 disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2017 (Neto)

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Barang	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi Belanja (Dalam Rupiah)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.091.712.000	4.048.777.497	98,95
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.760.000	17.415.000	73,30
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1.078.390.000	846.840.000	78,53
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	12.302.360.000	10.287.655.952	83,62
521211	Belanja Bahan	14.394.585.000	12.766.446.756	88,69
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	58.127.702.000	52.864.782.100	90,95
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	203.957.022.000	180.879.797.802	88,69
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41.856.395.000	39.708.891.586	94,87
522111	Belanja Langganan Listrik	2.904.000.000	2.710.822.368	93,35
522112	Belanja Langganan Telepon	780.000.000	564.047.947	72,31
522113	Belanja Langganan Air	372.000.000	338.961.412	91,12
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	67.262.000	34.023.861	50,58
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.001.820.000	533.922.500	53,30
522141	Belanja Sewa	14.627.749.000	10.746.369.896	73,47
522151	Belanja Jasa Profesi	75.765.467.000	66.918.040.000	88,32
522191	Belanja Jasa Lainnya	2.891.558.000	2.708.278.364	93,66
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.028.069.000	5.886.793.252	97,66
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.373.191.000	1.367.151.801	99,56

523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.010.055.000	6.613.651.839	94,35
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.604.000.000	2.336.458.617	89,73
524111	Belanja Perjalanan Biasa	153.414.768.000	133.304.572.446	86,89
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.127.830.000	1.719.035.000	80,79
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	144.859.943.000	141.875.573.900	97,94
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.984.366.000	7.029.279.900	88,04
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	900.330.000	773.730.720	85,94
524219	Belanja Perjalanan Lainnya-LN	36.420.774.000	31.039.546.616	85,22
Jumlah		796.965.108.000	717.920.867.132	90,08

Pada tabel 18 menunjukkan bahwa, realisasi belanja barang TA 2017 Audited masih lebih tinggi dibandingkan realisasi pada TA 2016 Audited yaitu sebesar Rp61.113.365.087,- atau sebesar 9,30 persen. Perbandingan realisasi belanja barang TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Barang	Realisasi		Naik/ (Turun) % 5=(3-4)/4x100
		TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	
1	2	3	4	5
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.048.777.497	6.197.794.734	(34,67)
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	17.415.000	16.155.000	7,80
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	846.840.000	923.889.000	(8,34)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.287.655.952	12.365.367.206	(16,80)
521211	Belanja Bahan	12.767.946.756	12.598.991.305	1,34
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53.082.391.700	53.762.991.000	(1,27)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	180.906.984.217	154.162.085.375	17,35
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39.708.891.586	26.597.745.654	49,29
522111	Belanja Langganan Listrik	2.710.822.368	2.776.895.553	(2,38)
522112	Belanja Langganan Telepon	564.047.947	658.666.478	(14,37)
522113	Belanja Langganan Air	338.961.412	330.534.462	2,55
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	34.023.861	0	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	533.922.500	430.899.500	23,91
522141	Belanja Sewa	10.746.369.896	9.456.074.523	13,65
522151	Belanja Jasa Profesi	67.204.015.000	64.816.111.440	3,68
522191	Belanja Jasa Lainnya	2.708.278.364	1.006.968.488	168,95
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.886.793.252	5.651.180.438	4,17
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.367.151.801	1.381.486.480	(1,04)
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.613.651.839	7.319.549.053	(9,64)
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	2.336.458.617	898.190.000	160,13
524111	Belanja Perjalanan Biasa	140.191.472.874	139.802.515.393	0,28
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.719.035.000	1.529.180.000	12,42

524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	141.975.778.900	121.573.969.050	16,78
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.029.279.900	5.602.179.000	0,00
524211	Belanja Perjalanan Biasa -Luar Negeri	773.730.720	37.703.880	0,00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya LN	34.875.820.968	41.134.066.097	(15,21)
Realisasi Belanja Bruto		729.276.517.927	671.031.189.109	8,68
521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	(11.067.300)	(100,00)
521211	Pengembalian Belanja Bahan	(1.500.000)	(750.000)	100,00
521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	(217.609.600)	(827.806.000)	(73,71)
521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(27.186.415)	(10.441.745)	160,36
522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	(285.975.000)	(580.445.000)	(50,73)
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	(6.886.900.428)	(9.813.764.441)	(29,82)
524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(100.205.000)	(33.000.000)	203,65
524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa-Luar Negeri	0	0	0,00
524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	(3.836.274.352)	(2.946.412.578)	30,20
Jumlah Pengembalian Belanja		(11.355.650.795)	(14.223.687.064)	(20,16)
Realisasi Belanja Neto		717.920.867.132	656.807.502.045	9,30

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp19.648.828.878,-

Realisasi Belanja Modal untuk TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited adalah masing-masing sebesar Rp19.648.828.878,- dan Rp8.502.562.958,-.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2017 disajikan dalam Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2017 (Neto)

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Modal	Anggaran	Realisasi Belanja (Neto)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.633.478.000	8.491.385.550	98,35
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.106.260.000	1.540.626.526	73,15
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	200.000.000	199.191.300	99,60
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8.306.254.000	8.065.755.502	97,10
534131	Belanja Modal Jaringan	560.227.000	549.870.000	98,15
536111	Belanja Modal Lainnya	830.000.000	802.000.000	96,63
Jumlah		20.636.219.000	19.648.828.878	95,22

Bila dibandingkan dengan TA 2016 *Audited*, realisasi Belanja Modal untuk TA 2017 *Audited* menunjukkan kenaikan sebesar Rp11.146.265.916,- atau sebesar 131,09 persen, tingginya realisasi Belanja Modal ini disebabkan karena adanya kegiatan renovasi atas sejumlah gedung kantor maupun rumah dinas guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI.

Perbandingan realisasi belanja modal TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited* dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited*

(Dalam Rupiah)

Kode MAK	Uraian Belanja Modal	Realisasi		Naik/(Turun) %
		TA 2017 <i>Audited</i>	TA 2016 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.491.385.550	6.746.936.530	25,86
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.540.626.526	0	0,00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	199.191.300	96.497.500	106,42
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8.065.755.502	1.659.128.928	386,14
534113	Belanja Modal Jaringan	549.870.000	0	0,00
536111	Belanja Modal Lainnya	802.000.000	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto		19.648.828.878	8.502.562.958	131,09
Pengembalian Belanja		0	0	0,00
Realisasi Belanja Neto		19.648.828.878	8.502.562.958	131,09

Pada akhir periode TA 2017 *Audited* dan TA 2016 *Audited* tidak terdapat pengembalian belanja modal sehingga realisasi belanja modal neto besarnya sama dengan realisasi belanja modal bruto.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp8.094.087.771,-

C.1. ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* adalah masing-masing sebesar **Rp8.094.087.771,-** dan **Rp20.018.539.412,-**.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Aset Lancar per 31 Des 2017 *Audited* dan per 31 Des 2016 *Audited*

No.	Aset Lancar	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 4,394,113	Rp 4,636,093,012
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 267,468,248	Rp 7,638,247,801
3	Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp 9,090,909
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp (45,455)
5	Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Rp 340,360,952	Rp -
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Rp (1,701,805)	Rp -
7	Persediaan	Rp 7,483,566,263	Rp 7,735,153,145
	Jumlah	Rp 8,094,087,771	Rp 20,018,539,412

**Kas di Bendahara
Pengeluaran**
Rp4.394.113,-

C. 1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran MPR RI per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* adalah masing-masing sebesar **Rp4.394.113,-** dan **Rp4.636.093.012,-**. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel 22.

Tabel 22
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per-Eselon I

Kode	Uraian eselon I	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp -	Rp 1,330,966,920	Rp (1,330,966,920)
2	MAJELIS	Rp 4,394,113	Rp 3,305,126,092	Rp (3,300,731,979)
Total		Rp 4,394,113	Rp 4,636,093,012	Rp (4,631,698,899)

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>
Rekening Bank	Rp -	Rp -
Uang Tunai	Rp 4,394,113	Rp 4,636,093,012
	Rp 4,394,113	Rp 4,636,093,012

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara melalui setoran pengembalian tambahan uang persediaan sebesar Rp4.394.113,- tanggal 5 Januari 2018 dengan NTPN 89AEB79AOLO0E9SP.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran.

C. 1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp267.468.248,-** dan **Rp7.638.247.801,-**. Kas Lainnya merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp267.468.248,-*

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Des 2017 Audited dan 31 Des 2016 Audited

No.	Keterangan	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited
1	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	Rp 267,468,248	Rp 7,638,247,801
	Jumlah	Rp 267,468,248	Rp 7,638,247,801

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Kas Lainnya dan setara Kas per-Eselon I

No	Uraian eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 133,611,474	Rp 2,461,687,831	Rp (2,328,076,357)
2	MAJELIS	Rp 133,856,774	Rp 5,176,559,970	Rp (5,042,703,196)
	Total	Rp 267,468,248	Rp 7,638,247,801	Rp (7,370,779,553)

Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas di bendahara pengeluaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah Setoran
Eselon I Sekretariat Jenderal				
1	Setoran saldo LS perjalanan TA 2017	F508A8M9EQ87K69	08/01/2018	Rp 80,554,400
2	Setoran pajak perjalanan TA 2017	BF440K8DTDE8SUP	09/01/2018	Rp 4,515,000
3	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	AD5DD0K8R0GFN1UP	09/01/2018	Rp 4,215,000
4	Setoran Piutang TGR jatuh tempo bulan Januari 2018 yang diterima di TA 2017	3DC7B435TNB1N8A9	16/01/2018	Rp 25,580,299
5	Setoran kelebihan Tukin Tusil bulan Des 2017	690B9435C8HL4CA9	16/01/2018	Rp 18,746,775
Eselon I Majelis				
1	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	389030JA5KA5OLUP	09/01/2018	Rp 15,572,789
2	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	9D5C50JAD6EP2VUP	09/01/2018	Rp 20,155,455
3	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	DBF6B0JAHRF4VFUP	09/01/2018	Rp 12,547,500
4	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	E824F0JAMGFGRVUP	09/01/2018	Rp 2,209,126
5	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	D74DE0JAV7S75DUP	09/01/2018	Rp 3,865,728

No	Keterangan	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah Setoran
6	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	F742D0JKKJQT4SUP	09/01/2018	Rp 36.582.500
7	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	4DAE10JKP8R91CUP	09/01/2018	Rp 6.311.335
8	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	9867E0JL9RMJCTUP	09/01/2018	Rp 2.545.454
9	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	3D9FA0JLFLV28HUP	09/01/2018	Rp 127.273
10	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	AC3D00JL0F86PUP	09/01/2018	Rp 12.637.500
11	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	332180JLL6TGCCUP	09/01/2018	Rp 1.106.909
12	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	226160JL0DBOHVUP	09/01/2018	Rp 2.365.000
13	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	383840JLQ57T0LUP	09/01/2018	Rp 2.909.088
14	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	E4D960K8560NVEUP	09/01/2018	Rp 1.595.853
15	Setoran Pajak Bendahara TA 2017 yang Belum Disetor ke Kas Negara	676290K88V31KJUP	09/01/2018	Rp 152.727
16	Setoran Piutang TGR jatuh tempo bulan Januari 2018 yang diterima di TA 2017	E97A9436Q81AHQA9	16/01/2017	Rp 13.172.537
JUMLAH				Rp 267.468.248

Penyetoran saldo per 31 Desember 2017 Audited per Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 26
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2017 ke Kas Negara

No	Uraian Eselon I	Kode Akun	Saldo Kas per 31 Des 2017	Penyetoran ke Kas Negara	Sisa Pembayaran ke Kas Negara
1	Sekretariat Jenderal	425791	Rp 25.580.299	Rp 25.580.299	Rp -
		425911	Rp 18.746.775	Rp 18.746.775	
		425912	Rp 80.554.400	Rp 80.554.400	
		219961	Rp 8.730.000	Rp 8.730.000	
2	Majelis	425911	Rp 120.684.237	Rp 120.684.237	Rp -
		219961	Rp 13.172.537	Rp 13.172.537	
Jumlah			Rp 267.468.248	Rp 267.468.248	Rp -

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan pajak
Rp0,-

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp0,-** dan **Rp9.090.909,-** yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 *Audited* dan 2016 disajikan pada tabel 27.

Tabel 27
Rincian Piutang Bukan Pajak per-Eselon I

Kode	Uraian eselon I	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp -	Rp 9,090,909	Rp (9,090,909)
2	MAJELIS	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp -	Rp 9,090,909	Rp (9,090,909)

Sedangkan mutasi Piutang PNBP pada tahun anggaran 2016 *Audited* adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp9,090,909
Mutasi tambah:	
-	Rp0
Mutasi kurang:	
- Pembayaran Piutang PNBP pada TA 2017	(Rp9,090,909)
Total Mutasi	(Rp9,090,909)
Saldo per 31 Desember 2017	0

Mutasi kurang sebesar Rp9.090.909,- merupakan pembayaran Piutang PNBP berupa sewa ruang koperasi tahun 2016 yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (000017) pada tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan kontrak nomor 2/01/2017 dan 2/01/kop/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Perjanjian Sewa Ruangan untuk Koperasi di Gedung MPR Kompleks MPR/DPR Jalan Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI. Pendapatan sewa ruang koperasi selama 2 tahun (1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017 *Audited*) tersebut telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp18.181.818,- dengan nomor NTPN 8D95079431O0L9CP.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
Rp0,-

C.1.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* adalah masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **(Rp45.455,-)** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 28
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per-Eselon I

Kode	Uraian eselon I	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp -	Rp 45,455	Rp (45,455)
2	MAJELIS	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp -	Rp 45,455	Rp (45,455)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp340.360.952,-

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp340.360.952,-** dan **Rp0,-**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 *Unaudited* tersaji pada Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I

No.	Eselon I	Jumlah Debitur	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>
1	Sekretariat Jenderal	107	Rp 252,920,303	Rp -
2	Majelis	142	87,440,649	Rp -
Jumlah		249	Rp 340,360,952	Rp -

Sedangkan mutasi Bagian Lancar TP/TGR pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp0
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dr TGR menjadi Bag. Lancar TGR	Rp340,360,952
Mutasi kurang:	
-	Rp0
Saldo per 31 Desember 2017	Rp340,360,952

Mutasi tambah Bagian lancar sebesar Rp340.360.952,- merupakan reklasifikasi Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi menjadi Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian lancar TP/TGR Rp1.701.805,-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar **Rp1.701.805,-** dan **Rp0,-** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rangkuman Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	249	340.360.952	0,5%	1.701.805
2	Kurang Lancar	-	-	10%	-
3	Diragukan	-	-	50%	-
4	Macet	-	-	100%	-
Total		249	340.360.952		1.701.805

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada tabel 31.

Tabel 31
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I

No	Eselon I	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Sekretariat Jenderal	Lancar	107	252,920,303	0,5%	1,264,602
2	Majelis	Lancar	142	87,440,649	0,5%	437,203
Total			249	340,360,952		1,701,805

Persediaan
Rp7.483.566.263,-

C.1.7. Persediaan

Nilai persediaan per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp7.483.566.263,-** dan **Rp7.735.153.145,-**. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per Eselon dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32
Rincian Persediaan per-Eselon I

No	Uraian eselon I	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
1	SEKRETARIAT JENDERAL	Rp 2,639,526,929	Rp 2,762,796,621	Rp (123,269,692)
2	MAJELIS	Rp 4,844,039,334	Rp 4,972,356,524	Rp (128,317,190)
Total		Rp 7,483,566,263	Rp 7,735,153,145	Rp (251,586,882)

Tabel 33
Rincian Persediaan per 31 Des 2017 *Audited* dan 31 Des 2016 *Audited*

Kode Akun	Uraian	31 Des 2017 <i>Audited</i>	31 Des 2016 <i>Audited</i>
117111	Barang Konsumsi	Rp 6,820,203,524	Rp 7,052,134,378
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp 68,921,768	Rp 58,807,961
117128	Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat	Rp 25,990,250	Rp 254,948,980
117131	Bahan Baku	Rp 23,609,000	Rp 11,807,000
117199	Persediaan Lainnya	Rp 544,841,721	Rp 357,454,826
Saldo Persediaan		Rp 7,483,566,263	Rp 7,735,153,145

Aset Tetap
Rp609.171.158.042,-

C. 2. ASET TETAP

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Aset Tetap, rincian koreksi dijelaskan pada masing-masing akun aset tetap yang dikoreksi.

Saldo nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp609.171.158.042,-** dan **Rp608.001.741.491,-**. Saldo Aset Tetap tersebut merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional MPR RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pada bulan Oktober 2017 dilaksanakan penilaian kembali atas (revaluasi) Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sebagai hasil dari pelaksanaan penilaian kembali tersebut telah terbit Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagai dasar pencatatan mutasi Aset Tetap yang tersaji pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2017 *Audited*. Sebagai lampiran Berita Acara Hasil Rekonsiliasi tersebut, terbit Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi.

Perbandingan antara Aset Tetap di Neraca dengan Laporan hasil SIMAK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2017 Audited

Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK-BMN	Selisih
Tanah	Rp 343,728,232,605	Rp 927,995,692,000	Rp (584,267,459,395)
Peralatan dan Mesin	Rp 148,831,544,599	Rp 148,831,544,599	Rp -
Gedung dan Bangunan	Rp 207,005,054,808	Rp 203,589,451,030	Rp 3,415,603,778
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	Rp -
Aset Tetap Lainnya	Rp 66,451,125,475	Rp 66,451,125,475	Rp -
Jumlah	Rp 779,662,235,187	Rp 1,360,514,090,804	Rp (580,851,855,617)
Akumulasi Penyusutan	Rp (170,491,077,145)	Rp (127,318,070,448)	Rp (43,173,006,697)
Nilai Buku	Rp 609,171,158,042	Rp 1,233,196,020,356	Rp (624,024,862,314)

Terdapat perbedaan saldo Aset Tetap yang tersaji pada Neraca Laporan Keuangan MPR RI TA 2017 *Audited* dengan Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Tahun Anggaran 2017 tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB). Perbedaan tersebut disebabkan karena nilai Aset Tetap yang tersaji dalam Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel Tahun Anggaran 2017 *Audited* telah menyajikan nilai Revaluasi Aset Tetap yang dilaksanakan pada Semester II TA 2017 sedangkan Aset Tetap yang tersaji pada Neraca per 31 Desember 2017 *Audited* disajikan berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018, tidak menyajikan nilai Revaluasi Aset Tetap yang dilaksanakan pada semester II TA 2017.

Berdasarkan Surat Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017, disampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari kosep temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 Tahap II salah satunya menyatakan bahwa hasil revaluasi tidak disajikan secara menyeluruh untuk satu kelompok aset dan terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian, makai disepakati bahwa pada penyusunan LKPP dan LKKL Tahun 2017 Audited.

Koreksi nilai revaluasi BMN dilakukan terhadap akun Aset Tetap yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional, dan Revaluasi Aset Tetap di Laporan Perubahan Ekuitas pada level Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan untuk Laporan Keuangan level Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I serta Laporan Barang Pengguna level Satuan Kerja sampai dengan level Kementerian Negara/Lembaga tidak dilakukan koreksi. Koreksi nilai revaluasi dilakukan oleh Satuan Kerja Konsolidasi pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembentukan Satker Konsolidasi.

Perbandingan rincian Aset Tetap MPR RI per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35
Perbandingan Aset Tetap per 31 Des 2017 *Audited* dan 31 Des 2016 *Audited*

No	Uraian	31 Des 2017	31 Des 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	Rp 343,728,232,605	Rp 343,728,232,605	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 148,831,544,599	Rp 139,263,126,534	Rp 9,568,418,065
3	Gedung dan Bangunan	Rp 207,005,054,808	Rp 203,328,496,465	Rp 3,676,558,343
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	Rp 0
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 66,451,125,475	Rp 60,618,883,915	Rp 5,832,241,560
	Jumlah	Rp 779,662,235,187	Rp 760,585,017,219	Rp 19,077,217,968
	Akumulasi Penyusutan	Rp (170,491,077,145)	Rp (152,583,275,728)	Rp (17,907,801,417)
	Nilai Buku Aset Tetap	Rp 609,171,158,042	Rp 608,001,741,491	Rp 1,169,416,551

Rincian Aset Tetap per eselon I disajikan pada tabel 36.

Tabel 36
Rincian Aset Tetap per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017	31 Des 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 1,228,249,238,296	Rp 602,216,385,857	Rp 626,032,852,439
Majelis	Rp 4,946,782,060	Rp 5,785,355,634	Rp (838,573,574)
Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rp (624,024,862,314)	Rp -	Rp (624,024,862,314)
	Rp 609,171,158,042	Rp 608,001,741,491	Rp 1,169,416,551

Mutasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2017 *Audited* adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 Audited	Rp	760,585,017,219
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	9,284,278,565
- Pengembangan	Rp	6,973,260,863
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	975,209,555
- Koreksi Tim Penertiban Aset	Rp	679,133,496,902
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	1,650,000
- Perolehan/Penambahan KDP	Rp	256,962,959
- Pengembangan melalui KDP	Rp	207,041,659
- Pengembangan KDP	Rp	1,596,751,526
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	1,646,672,826
- Reklasifikasi Masuk (Koreksi BPK)	Rp	918,468,400
- Jurnal Umum untuk membatalkan Revaluasi Gedung dan	Rp	3,415,603,778
Mutasi kurang:		
- Koreksi Pencatatan	Rp	(10,895,500)
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	(44,126,049,285)
- Pengembangan melalui KDP	Rp	(207,041,659)
- Reklasifikasi Keluar (Koreksi BPK)	Rp	(918,468,400)
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	(1,646,672,826)
- Pembatalan Revaluasi atas Aset Tetap yang sebenarnya merupakan Aset Lain-Lain (Koreksi BPK)	Rp	(54,155,592,000)
- Jurnal Umum untuk membatalkan Revaluasi Tanah	Rp	(584,267,459,395)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	779,662,235,187
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2017		(Rp170,491,077,145)
Nilai Buku per 31 Desember 2017		Rp609,171,158,042

Tanah
Rp343.728.232.605,-

C. 2.1 Tanah

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi kurang nilai Tanah sebesar Rp63.924.322.000,-. Koreksi tersebut berupa koreksi atas nilai Tanah yang sudah dihentikan penggunaannya namun masih disajikan sebagai Aset Tanah pada Neraca Laporan Keuangan TA 2017 *Unaudited*. Serta koreksi pembatalan revaluasi aset tetap. Koreksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Koreksi kurang sebesar Rp54.155.592.000,- berupa pengurangan nilai revaluasi atas tanah tersebut karena secara substansi aset tersebut merupakan aset lain-lain sehingga bukan merupakan obyek revaluasi aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Koreksi kurang sebesar Rp9.768.730.000,- merupakan mencatat aset Tanah tersebut sebagai Aset Lain-lain berdasarkan Surat Presiden Nomor S.438/MX.6/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki MPR per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp343.728.232.605,-** dan **Rp343.728.232.605,-**.

Rincian Aset secara detail per 31 Desember 2017 *Audited* adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Rincian Tanah

No.	Luas	Lokasi	Nilai	Keterangan
1	293 m2	Jl. Nusa Indah, Cilandak	Rp 1,019,342,605	Dikuasai MPR
2	271 m2	Jl. Melati, Cilandak	Rp 848,230,000	Dikuasai MPR
3	419 m2	Jl. Anggrek, Cilandak	Rp 1,311,470,000	Dikuasai MPR
4	1,647 m2	Jl. Cimalaya, Bandung	Rp 14,444,190,000	Dikuasai MPR
5	980 m2	Kampung Pecandra, Senayan	Rp 7,938,000,000	Dikuasai MPR
6	289 m2	Jl. Mawar, Cilandak	Rp 1,118,430,000	Dikuasai MPR
7	420 m2	Jl. Widya Candra III	Rp 3,402,000,000	Dikuasai MPR
8	14,404 m2	Komplek MPR RI, Cilandak Barat	Rp 45,084,520,000	Dikuasai MPR
9	125 m2	Jl. Anggrek, Cilandak Barat	Rp 391,250,000	Dikuasai MPR
10	2,760 m2	Jl. Widya Candra III	Rp 21,969,600,000	Dikuasai MPR
11	7,646 m2	Jl. Asia Afrika no.65, Kel. Braga, Bandung	Rp 246,201,200,000	Dikuasai MPR
	29,254 m2		Rp 343,728,232,605	

Pada Tahun 2017 dibangun sebuah Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen di atas aset Tanah Lapangan Tenis yang berada di Jalan Widya Candra III, Jakarta Pusat. Sampai dengan 31 Desember 2017

Audited, status tanah tersebut masih sebagai Tanah Lapangan Tenis dan akan dilakukan penyesuaian pada periode yang akan datang.

Terdapat 2 (dua) buah Bangunan Gedung Kantor Permanen yang telah ditetapkan status penggunaannya per 31 Desember 2017 Audited berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 465/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Barang Milik Negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tanggal 16 Juni 2017. Bangunan Kantor Permanen tersebut adalah Gedung Nusantara V yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta Pusat seluas 10.480 m2 dan Gedung MPR/DPD RI yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta Pusat seluas 15.023 m2.

Rincian tanah per eselon I dapat dilihat pada tabel 38.

Tabel 38
Rincian Tanah per-Eselon I

Eselon I	per 31 Des 2017 Audited	per 31 Des 2016 Audited	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 927,995,692,000	Rp 343,728,232,605	584,267,459,395
Majelis	0	0	0
Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rp (584,267,459,395)	Rp -	Rp (584,267,459,395)
Jumlah	Rp 343,728,232,605	Rp 343,728,232,605	584,267,459,395

Kenaikan nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 Audited	Rp 343,728,232,605
Mutasi tambah:	
- Koreksi Tim Penertiban Aset	Rp 584,267,459,395
Mutasi kurang:	
- Penghapusan kembali Revaluasi Aset Tetap (Koreksi BPK atas LKPP)	Rp (584,267,459,395)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 343,728,232,605
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2017	Rp0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp343,728,232,605

Transaksi mutasi Tanah pada TA 2017 berupa:

- Mutasi Tambah berupa koreksi tim penertiban aset pada Semester II TA 2017 senilai Rp584.267.459,- berupa:

No	Kelompok	Harga Perolehan
1	Tanah Persil	Rp 394,554,473,395
2	Tanah Non Persil	Rp 2,721,781,000
3	Lapangan	Rp 186,991,205,000
Jumlah		Rp 584,267,459,395

- Mutasi kurang senilai Rp584.267.459 berupa pengembalian nilai sebelum revaluasi aset tetap karena koreksi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *Unaudited*. BPK menilai revaluasi belum dilakukan menyeluruh terhadap seluruh kelompok Aset Tetap. Mutasi kurang tersebut berupa:

No	Kelompok	Harga Perolehan
1	Tanah Persil	Rp 394,554,473,395
2	Tanah Non Persil	Rp 2,721,781,000
3	Lapangan	Rp 186,991,205,000
Jumlah		Rp 584,267,459,395

C. 2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp148.831.544.599,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

1. Koreksi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.878.140,- karena adanya pengadaan Tahun Anggaran 2017 yang menghasilkan Peralatan dan Mesin berupa 2 (dua) buah lemari kayu namun menggunakan belanja mata anggaran 523111, dan aset tersebut belum tercatat dalam Laporan Keuangan MPR RI Tahun Anggaran 2017 *Unaudited*.
2. Koreksi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp 9.245.500,- karena adanya kesalahan pencatatan baterai kamera sekali pakai serta baterai handycam yang bisa diisi ulang sebagai Peralatan dan Mesin.

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Neraca per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing sebesar **Rp148.831.544.599,-** dan **Rp139.263.126.534,-**.

Tabel 39
Rincian Peralatan dan Mesin per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 129,400,463,690	Rp 119,900,410,625	Rp 9,500,053,065
Majelis	Rp 19,431,080,909	Rp 19,362,715,909	Rp 68,365,000
	Rp 148,831,544,599	Rp 139,263,126,534	Rp 9,568,418,065

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 Audited	Rp	139,263,126,534
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	9,237,778,565
- Pengembangan	Rp	339,885,000
- Reklasifikasi Masuk	Rp	918,468,400
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	1,650,000
Mutasi kurang:		
- Reklasifikasi Keluar	Rp	(918,468,400)
- Koreksi Pencatatan	Rp	(10,895,500)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	148,831,544,599
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2017	Rp	(1,038,071,320,509)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	(889,239,775,910)

Transaksi mutasi peralatan dan mesin senilai Rp9.542.785.425,- berupa:

- Mutasi tambah berupa Pembelian sebesar Rp9.237.778.565,- , dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Bantu	Rp 103,264,700
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 3,187,306,350
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 550,000
4	Alat Kantor	Rp 1,254,032,540
5	Alat Rumah Tangga	Rp 2,756,760,725
6	Alat Studio	Rp 116,057,700
7	Alat Komunikasi	Rp 14,556,500
8	Alat Kedokteran Umum	Rp 24,040,500
9	Alat Kesehatan Umum	Rp 13,310,550
10	Unit Alat Laboratorium	Rp 202,108,500
11	Alat Khusus Kepolisian	Rp 12,050,500
12	Komputer Unit	Rp 580,852,000
13	Peralatan Komputer	Rp 583,037,000
14	Alat SAR	Rp 2,211,000
15	Alat Kerja Penerbangan	Rp 346,500,000
16	Peralatan Olahraga	Rp 41,140,000
Jumlah		Rp 9,237,778,565

- Mutasi tambah berupa Pengembangan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp339.885.000,- , dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 157.525.000
2	Alat Kantor	Rp 4.600.000
3	Peralatan Komputer	Rp 177.760.000
Jumlah		Rp 339.885.000

- Mutasi tambah sebesar Rp918.468.400,- berupa reklasifikasi masuk Peralatan dan mesin yang disebabkan oleh koreksi BPK karena kesalahan kodefikasi, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Bantu	Rp 198,000,000
2	Alat Kantor	Rp 174,318,400
3	Alat Rumah Tangga	Rp 5,995,000
4	Alat Studio	Rp 525,195,000
5	Komputer Unit	Rp 14,960,000
Jumlah		Rp 918,468,400

- Mutasi tambah berupa Koreksi Pencatatan Nilai/kuantitas sebesar Rp1.650.000, sebagai berikut:- :

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Rumah Tangga	Rp 1.650.000
Jumlah		Rp 1.650.000

- Mutasi kurang sebesar Rp918.468.400,- berupa reklasifikasi keluar Peralatan dan mesin yang disebabkan oleh koreksi BPK karena kesalahan kodefikasi, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Kantor	Rp 518,100,000
2	Alat Rumah Tangga	Rp 5,995,000
3	Alat Khusus Kepolisian	Rp 32,913,400
4	Peralatan Komputer	Rp 14,960,000
5	Alat Kerja Penerbangan	Rp 346,500,000
Jumlah		Rp 918,468,400

- Mutasi kurang sebesar Rp10.895.500,- berupa koreksi pencatatan yang disebabkan oleh koreksi BPK karena baterai kamera dan handycam yang seharusnya bukan merupakan Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*.

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Rumah Tangga	Rp 1,650,000
2	Alat Khusus Kepolisian	Rp 9,245,500
Jumlah		Rp 10,895,500

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 *Audited* disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan Bangunan
Rp207.005.054.808,-

C. 2.3 Gedung dan Bangunan

Terdapat koreksi berupa pembatalan Revaluasi Aset Tetap karena rekomendasi BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2017 *Unaudited*. Kementerian Negara/Lembaga akan menyajikan nilai revaluasi aset tetap jika proses revaluasi sudah selesai dilaksanakan. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan pelaporan Keuangan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017, maka terdapat koreksi tambah nilai gedung dan Bangunan sebesar Rp3.415.603.778,-.

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp207.005.054.808,-** dan **Rp203.328.496.465,-**.

Tabel 40
Rincian Gedung dan Bangunan per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017	31 Des 2016 <i>Audited</i>	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 203,589,451,030	Rp 203,328,496,465	Rp 260,954,565
Majelis	0	0	0
Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rp 3,415,603,778	Rp -	Rp 3,415,603,778
	Rp 207,005,054,808	Rp 203,328,496,465	Rp 3,676,558,343

Tabel 41
Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	NUP	Status Penguasaan	Saldo per 31 Des 2017 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen			
Gedung Nusantara V, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta Pusat	1	Dikuasai K/L	62,062,273,852
Gedung MPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta Pusat	2	Dikuasai K/L	96,653,243,900
Gd. Bharana Graha, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta Pusat	4	Dikuasai K/L	20,882,746,790
Bangunan Gudang Tertutup Permanen			
Gudang ATK, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakpus	1	Dikuasai K/L	240,650,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen			
Jl. Diponegoro No. 20 Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung (Mess Bandung)	1	Dikuasai K/L	9,420,575,031

Uraian	NUP	Status Penguasaan	Saldo per 31 Des 2017 (Rp)
Bangunan Olah Raga Tertutup Permanen			
Gd. Olah Raga Bulu Tangkis Indoor, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta Pusat	1	Dikuasai K/L	238,219,000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen			
Gd. Olah Raga Bulu Tenis, Jl. Widya Chandra III RT 012 RW 03, Kebayoran Baru, Jakarta	1	Dikuasai K/L	242,237,000
Gedung Pos Jaga Permanen			
Jl. Angrek No. 1 Komp MPR RI RT 004 RW 07, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	1	Dikuasai K/L	88,962,995
Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat			
Ruang Delegasi, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta Pusat	1	Dikuasai K/L	12,025,653,857
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen			
Jl. Angrek No. 1 Komp MPR RI RT 004 RW 07, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	1	Dikuasai K/L	1,375,763,517
Jl. Widya Chandra III RT 012 RW 03 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru	3	Dikuasai K/L	1,646,672,826
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen			
Jl. Nusa Indah No. 78ART 004 RW 07 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	1	Dikuasai K/L	518,992,740
Jl. Melati No. 78A RT 004 RW 07 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	2	Dikuasai K/L	584,662,740
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen			
Jl. Mawar No. A149 RT 004 RW 07 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	6	Dikuasai K/L	883,760,560
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen			
Jl. Widya Chandra III No.17A RT 012 RW 03 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru	2	Dikuasai K/L	105,549,000
Pagar Permanen			
Jalan Angrek RT002 RW 007, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak. Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1	Dikuasai K/L	19,919,000
Pagar Semi Permanen			
Pagar Besi di belakang Gedung Bharana Graha	1	Dikuasai K/L	15,172,000
Total Jumlah Aset	17		207,005,054,808

Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp	203,328,496,465
Mutasi tambah:		
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	88,962,995
- Koreksi Tim Penertiban Aset	Rp	40,710,445,507
- Pengembangan Nilai Aset	Rp	1,733,880,863
- Pengembangan Melalui KDP	Rp	207,041,659
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	1,646,672,826
- Menghapuskan penyajian revaluasi Gedung dan bangunan (Rekomendasi BPK atas LKPP)	Rp	3,415,603,778
Mutasi kurang:		
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	(44,126,049,285)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	207,005,054,808
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	(47,218,863,812)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	159,786,190,996

Transaksi mutasi penambahan Gedung dan Bangunan senilai Rp260.954.565,- berupa:

- Mutasi tambah berupa transaksi pengembangan senilai Rp1.733.880.863,- berupa:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 1,234,220,636
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 499,660,227
Jumlah		Rp 1,733,880,863

- Mutasi tambah berupa transaksi pengembangan melalui KDP senilai Rp207.041.659,- berupa:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 207,041,659
Jumlah		Rp 207,041,659

- Mutasi tambah berupa penyelesaian pembangunan langsung gedung dan bangunan senilai Rp88.962.995,- berupa:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 88.962.995
Jumlah		Rp 88.962.995

- Mutasi tambah berupa Koreksi Tim penertiban Aset senilai Rp40.710.455.507,- , dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 41,688,059,939
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp (1,056,834,812)
3	Tugu Tanda/Tanda Batas	Rp 79,220,380
Jumlah		Rp 40,710,445,507

- Mutasi tambah berupa Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.646.672.826,- , dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 1.646.672.826
Jumlah		Rp 1.646.672.826

- Mutasi tambah berupa pembatalan penyajian nilai revaluasi aset tetap pada Neraca MPR RI TA 2017, sehingga menambah nilai aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.415.603.778,-, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 1,971,905,221
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 1,519,144,557
3	Tugu Tanda/Tanda Batas	Rp (75,446,000)
Jumlah		Rp 3,415,603,778

- Mutasi kurang berupa Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar (Rp44.126.049.285,-) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp (43.659.965.160)
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp (462.309.745)
3	Tugu Tanda/Tanda Batas	Rp (3.774.380)
Jumlah		Rp (44.126.049.285)

Koreksi semu dilakukan untuk menurunkan nilai aset tetap sebelum revaluasi menjadi nilai buku sebelum revaluasi. Kontra akun dari Gedung dan Bangunan di sisi kredit ini adalah Revaluasi Aset Tetap di sisi debit.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini. Rincian penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan jaringan
Rp13.646.277.700,-

C. 2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited masing-masing adalah sebesar Rp13.646.277.700,- dan Rp13.646.277.700,-.

Tabel 42
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	Rp -
Majelis	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 13,646,277,700	Rp 13,646,277,700	Rp -

Transaksi penambahan dan pengurangan Rincian Jalan, Irigasi, dan jaringan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 13,646,277,700
Mutasi tambah:	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
-	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 13,646,277,700
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp (3.200.892.824)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp 10,445,384,876

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Rincian penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp66.451.125.475,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited masing-masing adalah sebesar Rp66.451.125.475,- dan Rp60.618.883.915,-.

Tabel 43
Rincian Aset Tetap Lainnya per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 62,888,347,399	Rp 57,152,105,839	Rp 5,736,241,560
Majelis	Rp 3,562,778,076	Rp 3,466,778,076	Rp -
	Rp 66,451,125,475	Rp 60,618,883,915	Rp 5,736,241,560

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 60,618,883,915
Mutasi tambah:	
- Pengembangan	Rp 4,849,995,000
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 886,246,560
- Pembelian	Rp 96,000,000
Mutasi kurang:	Rp -
-	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 66,451,125,475
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2017	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp 66,451,125,475

Transaksi mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah berupa Pengembangan sebesar Rp4.849.995.000,- dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Rp 4.849.995.000
Jumlah		Rp 4.849.995.000

- Mutasi tambah berupa Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp886.246.560,-, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Rp 886.246.560
Jumlah		Rp 886.246.560

- Mutasi tambah berupa pembelian buku-buku perpustakaan sebesar Rp96.000.000,-

No	Uraian per Kelompok	Harga Perolehan
1	Bahan perpustakaan Tercetak	Rp 96.000.000
Jumlah		Rp 96.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini. Rincian penyusutan Aset Tetap Lainnya disajikan Lampiran A1 yang dilampirkan sebagai pendukung Catatan atas Laporan Keuangan.

C.2.6 Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,-

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar **Rp0,-** dan **Rp0,-** yang merupakan biaya Konsultasi Perencana pengadaan rumah dinas Sekretariat Jenderal MPR RI. Rumah dinas yang direncanakan akan dibangun tersebut berada di Jl. Widya Chandra III, kel. Senayan, kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Transaksi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 Audited	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Perolehan/Penambahan KDP	Rp	49,921,300
- Pengembangan KDP	Rp	1,596,751,526
Mutasi kurang:		
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp	(1,646,672,826)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2017	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	-

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap**
Rp170.491.077.145,-

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disebabkan oleh koreksi kurang akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp43.184.513.424,-. Koreksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 82.915.776,-, disebabkan proses reklasifikasi keluar karena koreksi kesalahan kodefikasi Peralatan dan Mesin yang tersaji pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*.
- Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 92.255.377,-, disebabkan proses reklasifikasi masuk karena koreksi kesalahan kodefikasi Peralatan dan Mesin yang tersaji pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*.
- Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.155.688,- karena kesalahan pencatatan baretai kamera dan baterai handycam sebagai Aset Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*, seharusnya bukan sebagai Perlatan dan Mesin.
- Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.487.814,- karena koreksi penambahan aset tetap peralatan dan mesin karena adanya pengadaan TA 2017 yang menghasilkan aset tetap peralatan dan mesin berupa dua buah lemari kayu namun bukan dari belanja modal, dan aset tersebut belum tercatat dalam Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*.
- Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp165.000,- karena perbaikan atas akumulasi penyusutan peralatan dan mesin TA 2017 *Unaudited* yang disebabkan oleh kesalahan pada aplikasi SIMAK-BMN.

- Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.126.049.285,- berdasarkan Surat Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017, dilakukan jurnal umum yang dilakukan untuk membatalkan penihilan akumulasi Gedung dan bangunan yang terjadi revaluasi Gedung dan Bangunan pada Semester II TA 2017.
- Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp953.042.588,- berdasarkan Surat Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017, dilakukan jurnal koreksi beban penyusutan yang terbentuk karena Revaluasi Aset Tetap TA 2017.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp170.491.077.145,-** dan **Rp152.583.275.728,-** .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 *Audited* tersaji pada Tabel 44.

Tabel 44
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 343,728,232,605	Rp -	Rp 343,728,232,605
2	Peralatan dan Mesin	Rp 148,831,544,599	Rp 120,071,320,509	Rp 28,760,224,090
3	Gedung dan Bangunan	Rp 207,005,054,808	Rp 47,218,863,812	Rp 159,786,190,996
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 13,646,277,700	Rp 3,200,892,824	Rp 10,445,384,876
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 66,451,125,475	Rp -	Rp 66,451,125,475
	Akumulasi Penyusutan	Rp 779,662,235,187	Rp 170,491,077,145	Rp 609,171,158,042

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 *Audited* disajikan pada Lampiran A1 Laporan keuangan ini.

C. 3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp108.400.474,-

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp108.400.474,-** dan **Rp0,-**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 *Audited* tersaji pada Tabel 45.

Tabel 45
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I

No.	Eselon I	Jumlah debitur	31 Des 2017	31 Des 2017
1	Sekretariat Jenderal	82	Rp 83.831.504	Rp -
2	Majelis	88	Rp 24.568.970	Rp -
Jumlah		170	Rp 108.400.474	Rp -

Sedangkan mutasi Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi sampai dengan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 <i>Audited</i>	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pengakuan Piutang TGR	Rp	942.500.730
Mutasi kurang:		
- Pelunasan Piutang TGR	Rp	(493.739.304)
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang TP/TGR	Rp	(340.360.952)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	108.400.474

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Transaksi penambahan sebesar Rp942.500.730,- berupa pengakuan Piutang TP/TGR berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 123A Tahun 2017 tentang

Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 72A22 Tahun 2017 tentang Biaya Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai Pemerintah Non Pegawai negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 tanggal 18 Mei 2018.

- Transaksi pengurangan sebesar Rp493.739.304,- berupa pelunasan Piutang TP/ TGR selama TA 2017.
- Transaksi pengurangan sebesar Rp340.360.952,- merupakan reklasifikasi Piutang TP/TGR menjadi Bagian Lancar- Piutang TP/TGR

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan TP/TGR Rp542.003,-

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited adalah masing-masing sebesar **Rp542.003,-** dan **Rp0,-** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 46.

Tabel 46
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Lancar	170	108.400.474	0,5%	542.003
2	Kurang Lancar	-	-	10%	-
3	Diragukan	-	-	50%	-
4	Macet	-	-	100%	-
Total		170	108.400.474		542.003

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per eselon I tersaji pada tabel 47.

Tabel 47
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I

No	Eselon I	Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Sekretariat Jenderal	Lancar	82	83.831.504	0,5%	419.158
2	Majelis	Lancar	88	24.568.970	0,5%	122.845
Total			170	108.400.474		542.003

Aset Lainnya
Rp11.598.073.474,-

C. 4. ASET LAINNYA

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Aset Lainnya yang disebabkan oleh koreksi tambah Aset Lainnya sebesar Rp9.768.730.000,-. Koreksi tersebut berupa koreksi atas Aset Tetap Tanah yang sudah dihentikan penggunaannya namun disajikan sebagai Aset Tetap tanah pada Laporan Keuangan TA 2017 *Unaudited*, sehingga berdasarkan koreksi Badan pemeriksa Keuangan dicatat kembali sebagai Aset Lainnya.

Nilai buku Aset Lainnya menurut Neraca per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp11.598.073.474,-** dan **Rp10.929.090.544,-**. Rincian Aset Lainnya per eselon I disajikan pada tabel 48.

Tabel 48
Rincian Aset Lainnya per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 11,536,226,854	Rp 10,858,993,924	Rp 677,232,930
Majelis	Rp 61,846,620	Rp 70,096,620	Rp (8,250,000)
	Rp 11,598,073,474	Rp 10,929,090,544	Rp 668,982,930

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 13,340,539,940
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp 802,000,000
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi aset tetap	Rp (9,768,730,000)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 4,373,809,940
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp (2,544,466,466)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp 1,829,343,474

Aset Tak Berwujud
Rp2.048.944.540,-

C. 4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud termasuk dalam aset lainnya menurut Neraca per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* adalah sebesar **Rp2.048.944.540,-** dan **Rp1.246.944.540,-**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset tak Berwujud per 31 Desember 2017 *Audited* adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 1,991,222,920
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 57,721,620
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 2,048,944,540
Penyusutan s.d. 31 Desember 2017		Rp (1,260,756,045)
Jumlah Nilai Buku per 31 Desember 2017		Rp 788,188,495

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon-1 disajikan pada tabel 50:

Tabel 50
Rincian Aset Tak Berwujud per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 1,702,626,150	Rp 900,626,150	Rp 802,000,000
Majelis	Rp 346,318,390	Rp 346,318,390	Rp -
	Rp 2,048,944,540	Rp 1,246,944,540	Rp 802,000,000

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 <i>Audited</i>	Rp	1,246,944,540
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	802,000,000
Mutasi kurang:		
-	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	2,048,944,540
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	(1,260,756,045)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	788,188,495

Transaksi mutasi Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah berupa pembelian sebesar Rp802.000.000,- dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Aplikasi Penunjang Kinerja Persuratan dan Kearsipan	Rp 90,000,000
2	Aplikasi Pelayanan Kesehatan	Rp 48,000,000
3	Aplikasi Penunjang Kinerja Kesejahteraan Pegawai	Rp 185,000,000
4	Aplikasi Penunjang Kerja Ortala	Rp 90,000,000
5	Aplikasi PPID	Rp 85,000,000
6	Aplikasi Pengelolaan BMN	Rp 150,000,000
7	Aplikasi Whistle Blower System	Rp 130,000,000
8	Aplikasi Penunjang Kinerja Pembukuan dan Verifikasi	Rp 24,000,000
Jumlah		Rp 802,000,000

Aset Lain-lain
Rp12.093.595.400,-

C. 4.2. Aset Lain-lain/Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Aset Lain-lain/Aset Tetap yang Tidak Digunakan disebabkan oleh koreksi tambah sebesar Rp9.768.730.000,-. Koreksi tersebut berupa koreksi atas Aset Tetap yang sudah dihentikan penggunaannya dilakukan revaluasi dan disajikan sebagai Aset Tetap tanah pada Laporan Keuangan TA 2017 *Unaudited*, sehingga berdasarkan koreksi Badan pemeriksa Keuangan dicatat kembali sebagai Aset Lainnya. Aset berupa tanah tersebut telah mendapatkan persetujuan hibah berdasarkan Surat Presiden Nomor S.438/MX.6/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Nilai perolehan Aset Lain-lain/Aset Tetap Yang Tidak Digunakan menurut Neraca per 31 Desember 2017 *Audited* dan 31 Desember 2016 *Audited* masing-masing adalah sebesar **Rp12.093.595.400,-** dan **Rp12.093.595.400,-**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Setjen MPR RI.

Tabel 51
Rincian Aset Lain-lain per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 12,093,595,400	Rp 12,093,595,400	Rp -
Majelis	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 12,093,595,400	Rp 12,093,595,400	Rp -

Tabel 52
Rincian Aset Lain-lain

Uraian	NUP	Status Penguasaan	Saldo per 31 Des 2017 (Rp)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II			
Komp MPR RI Jl. Sakura No. A 127 RT 004 RW 07, Kel. Cilandak Barat	2	Dikuasai K/L	1,041,030,000
Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan			
Jl. Anggrek RT001/RW07, kel. Cilandak Barat	1	Dikuasai K/L	9,768,730,000
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen			
Komp MPR RI Jl. Sakura No. A 127 RT 004 RW 07, Kel. Cilandak Barat	2	Dikuasai K/L	736,400
Alat Rumah Tangga			
AC Central	1 s.d. 3		1,283,099,000
Total Jumlah Aset	5		12,093,595,400

Perlu kami informasikan bahwa Rumah Negara Golongan II tipe A Permanen beserta Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas 263 m² yang beralamat di Jl. Sakura No. A127 tersebut saat ini sedang digunakan sebagai Puskesmas.

Berdasarkan Laporan dari Tim Penelaahan dan Pemeriksaan Setjen MPR, terdapat Barang Milik Negara yang tidak ditemukan keberadaannya namun belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Barang yang tidak ditemukan keberadaannya tersebut merupakan Barang Milik Negara yang sedang dalam proses penghapusan ke Kanwil DJKN DKI Jakarta berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal MPR RINomor B-990/PL.06/B-VI/SetjenMPR/04/2018 tanggal 16 April 2018 hal Permohonan Penghapusan BMN.

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2016 Audited	Rp 12,093,595,400
Mutasi tambah:	
- Dicatat kembali menjadi Aset Lain-lain (Koreksi BPK)	Rp 9,768,730,000
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi aset tetap	Rp (9,768,730,000)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp 12,093,595,400
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp (1,283,710,421)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp 10,809,884,979

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp2.544.466.466,-

C. 4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp2.544.466.466,-** dan **Rp2.411.449.396,-**.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	Rp 1,991,222,920	Rp 1,260,756,045	Rp 730,466,875
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 57,721,620	Rp -	Rp 57,721,620
	Jumlah	Rp 2,048,944,540	Rp 1,260,756,045	Rp 788,188,495
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp 12,093,595,400	Rp 1,283,710,421	Rp 10,809,884,979
	Jumlah	Rp 12,093,595,400	Rp 1,283,710,421	Rp 10,809,884,979
	Total	Rp 14,142,539,940	Rp 2,544,466,466	Rp 11,598,073,474

KEWAJIBAN

C. 5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 Audited adalah sebesar **Rp675.989.640,-**. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 Audited sebesar **Rp9.598.773.643,-**.

Kewajiban Jangka Pendek
Rp.675.989.640,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel 54.

Tabel 54
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Aset Lancar	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited
Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 406,765,290	Rp 2,578,806,837
Pendapatan Diterima di Muka	Rp 135,416,000	Rp -
Uang Muka dari KPPN	Rp 4,394,113	Rp 4,636,093,012
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 129,414,237	Rp 2,383,873,794
	Rp 675,989,640	Rp 9,598,773,643

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per Eselon I tersaji pada tabel 55

Tabel 55
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 547.521.290	Rp 3.966.311.588	Rp (3.418.790.298)
Majelis	Rp 128.468.350	Rp 5.632.462.055	Rp (5.503.993.705)
	Rp 675.989.640	Rp 9.598.773.643	Rp (8.922.784.003)

C. 5.1 Utang pada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp406.765.290,-*

Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 *Audited* sebesar **Rp406.765.290,-**. Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 *Audited* sebesar **Rp2.578.806.837,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Tabel 56
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 403,375,290	Rp 2,578,806,837	Rp (2,175,431,547)
Majelis	Rp 3,390,000	Rp -	Rp 3,390,000
	Rp 406,765,290	Rp 2,578,806,837	Rp (2,172,041,547)

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 57.

Tabel 57
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 Audited

No	Uraian Eselon I	Jenis Transaksi	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 130.981.207
		- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 272.394.083
		Sub Total	Rp 403.375.290
2	Majelis	- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 3.390.000
		Sub Total	Rp 3.390.000
Total			Rp 406.765.290

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp135.416.000,-

C. 5.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 Audited dan 2016 adalah masing-masing sebesar **Rp135.416.000,-** dan **Rp0,-**. Pendapatan Diterima di Muka adalah PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa sewa ruang kantor dan ATM yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Tabel 58
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 135.416.000	Rp -	Rp 135.416.000
Majelis	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 135.416.000	Rp -	Rp 135.416.000

Tabel 59
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 Audited

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	- BANK BRI Persero Tbk.	Rp 135,416,000	Pendapatan Sewa Ruang kantor dan ATM Bank BRI Persero Tbk untuk bulan Januari s.d. Desember 2018 yg sudah diterima pada Januari TA 2017
Total		Rp 135,416,000	

Uang Muka dari
KPPN Rp4.394.113,-

C. 5.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp4.394.113,-** dan **Rp4.636.093.012,-**. Akun ini merupakan penyeimbang Kas di Bendahara Pengeluaran. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan

(TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel 60
Rincian Uang Muka dari KPPN per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp 1,330,966,920	Rp (1,330,966,920)
Majelis	Rp 4,394,113	Rp 3,305,126,092	Rp (3,300,731,979)
Jumlah	Rp 4,394,113	Rp 4,636,093,012	Rp (4,631,698,899)

C. 5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp129.414.237,-

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp129.414.237,-** dan **Rp2.383.873.794,-**.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 61
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 8,730,000	Rp 56,537,831	Rp (47,807,831)
Majelis	Rp 120,684,237	Rp 2,327,335,963	Rp (2,206,651,726)
Jumlah	Rp 129,414,237	Rp 2,383,873,794	Rp (2,254,459,557)

EKUITAS

Ekuitas
Rp628.295.188.118,-

C. 6. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2017 Audited dan 31 Desember 2016 Audited masing-masing adalah sebesar **Rp628.295.188.118,-** dan **Rp629.350.597.804,-**. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian Ekuitas per Eselon-1 disajikan pada tabel 62, sedangkan rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas.

Tabel 62
Rincian Ekuitas per-Eselon I

Eselon I	31 Des 2017 Audited	31 Des 2016 Audited	Kenaikan/ Penurunan
Sekretariat Jenderal	Rp 1,242,346,150,310	Rp 615,673,565,019	Rp 626,672,585,291
Majelis	Rp 9,973,900,122	Rp 13,677,032,785	Rp (3,703,132,663)
Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat	Rp (624,024,862,314)	Rp -	Rp (624,024,862,314)
Jumlah	Rp 628,295,188,118	Rp 629,350,597,804	Rp (1,055,409,686)

D. PENJELASAN ATAS POS_POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Pendapatan PNBP
Rp150.623.753,-

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp150.623.753,-** dan **Rp150.623.753,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	TA 2017 <i>Audited</i>	TA 2016 <i>Audited</i>	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp150,623,753	Rp150,623,753	-
Jumlah Pendapatan Jasa	Rp150,623,753	Rp150,623,753	-
Jumlah	Rp150,623,753	Rp150,623,753	-

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa ruang kantor dan ATM Bank BRI, serta sewa rumah dinas oleh pejabat di lingkungan Setjen MPR RI.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (LRA) ditambah Piutang PNBP akhir tahun ditambah Pendapatan Diterima di Muka PNBP awal tahun dikurangi Piutang PNBP Awal Tahun dikurangi Pendapatan Diterima di Muka PNBP akhir tahun. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	PNBP TA 2017 (LO)	Rp 150,623,753
b	PNBP TA 2017 (LRA)	Rp 4,069,761,827
c	Piutang PNBP Akhir Tahun 2017	Rp -
d	Pendapatan Diterima di Muka PNBP Awal Tahun 2017	Rp -
e	Piutang PNBP Awal Tahun 2017	Rp 9,045,454
f	Pendapatan Diterima di Muka PNBP Akhir Tahun 2017	Rp 135,416,000
g	Jumlah (b+c+d-e-f)	Rp 3,925,300,373
Selisih persamaan PNBP (a-g)		Rp(3,774,676,620)

Selisih senilai Rp3.774.676.620,- tersebut berasal dari :

- Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 3.774.631.165,-
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP awal TA 2017 sebesar Rp45.455,-

Beban Pegawai
Rp77.018.138.182,-

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp77.018.138.182,-** dan **Rp70.912.223.905,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel 63.

Tabel 63
Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 13,267,760,379	Rp 12,893,810,660	2.90
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 195,268	Rp 209,579	(6.83)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 884,488,140	Rp 844,825,226	4.69
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 266,049,262	Rp 256,171,749	3.86
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 1,179,905,000	Rp 1,172,514,766	0.63
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 29,000,000	Rp 32,000,000	(9.38)
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 49,104,403	Rp 151,799,231	(67.65)
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 747,157,140	Rp 740,784,180	0.86
Beban Uang Makan PNS	Rp 1,975,542,000	Rp 1,975,401,000	0.01
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 527,084,310	Rp 537,905,000	(2.01)
Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	Rp 329,280,000	Rp 329,280,000	-
Beban Pembulatan Gaji Pejabat negara	Rp 1,680	Rp 1,680	-
Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	Rp 30,576,000	Rp 30,576,000	-
Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	Rp 9,828,000	Rp 9,828,000	-
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	Rp 1,056,900,000	Rp 1,056,900,000	-
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	Rp 187,280,128	Rp 187,280,128	-
Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	Rp 15,642,720	Rp 15,642,720	-
Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	Rp 950,039,000	Rp 951,408,000	(0.14)
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	Rp 5,468,623,500	Rp 5,154,457,500	6.10
Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	-

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	Rp 1,056,900,000	Rp 1,056,900,000	-
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	Rp 187,280,128	Rp 187,280,128	-
Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	Rp 15,642,720	Rp 15,642,720	-
Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	Rp 950,039,000	Rp 951,408,000	(0.14)
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	Rp 5,468,623,500	Rp 5,154,457,500	6.10
Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	-
Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	Rp 462,000,000	Rp 440,000,000	5.00
Beban Uang Lembur	Rp 113,212,000	Rp 54,869,000	106.33
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	Rp 49,338,469,252	Rp 43,946,559,486	12.27
Jumlah Beban Pegawai	Rp 77,018,138,182	Rp 70,912,223,905	8.61

Beban Pegawai pada Laporan Operasional seharusnya sama dengan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dikurangi Biaya Pegawai yang masih harus dibayar Awal Tahun ditambah Biaya Pegawai yang masih harus dibayar Akhir Tahun dikurangi pengembalian Belanja Pegawai yang disetorkan di tahun berikutnya. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Belanja Pegawai (LO)	Rp 77,018,138,182
b	Belanja Pegawai (LRA)	Rp 76,902,513,750
c	Hutang Belanja Pegawai Akhir Tahun	Rp 134,371,207
d	Hutang Belanja Pegawai Awal Tahun	Rp -
e	Kas Lainnya yang merupakan pengembalian Belanja Pegawai di tahun berikutnya	Rp 18,746,775
f	Jumlah (b+c-d-e)	Rp 77,018,138,182
	Selisih persamaan Belanja Pegawai (a-f)	Rp -

Tidak terdapat selisih persamaan Belanja Pegawai yang tersaji pada Laporan Operasional TA 2017 dengan Belanja Pegawai yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2017.

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp41.880.342.459,-

Jumlah Beban Persediaan untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp41.880.342.459,-** dan **Rp27.198.396.646,-**. Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada tabel 64.

Tabel 64
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN)
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 39,351,836,825	Rp 25,038,918,790	57.16
Beban Persediaan Bahan Baku	Rp 81,099,000	Rp 55,704,000	45.59
Beban Persediaan Lainnya	Rp 2,447,406,634	Rp 2,103,773,856	16.33
Jumlah Beban Persediaan	Rp 41,880,342,459	Rp 27,198,396,646	53.98

Beban Persediaan (LO) seharusnya sama dengan Persediaan Awal Tahun ditambah Belanja Barang (Persediaan) LRA dikurangi Persediaan Akhir Tahun. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Beban Persediaan (LO)	Rp 41,880,342,459
b	Belanja Barang Persediaan TA 2017	Rp 39,708,891,586
c	Persediaan Awal tahun (Tidak termasuk Persediaan yang berasal dari Beban Pemeliharaan dan Beban Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat)	Rp 7,421,396,204
d	Persediaan Akhir (Tidak termasuk Persediaan yang berasal dari Beban Pemeliharaan dan Beban Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat)	Rp 7,388,654,245
e	Jumlah (c+b-d)	Rp 39,741,633,545
	Selisih persamaan Beban Persediaan (a-e)	Rp 2,138,708,914

Selisih persamaan Beban Persediaan yang tersaji di Laporan Operasional TA 2017 dengan Belanja Persediaan yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 sebesar Rp2.138.708.914,- tersebut berasal dari :

- Pembelian Barang Persediaan dengan menggunakan akun 521211

- sebesar Rp2.379.890.876,- (faktor penambah beban persediaan yang tersaji di Laporan Operasional)
- Hasil opname fisik pada akhir tahun 2017 yang menambah saldo barang persediaan sebesar Rp11.302.500,- (faktor penambah beban persediaan yang tersaji di Laporan Operasional)
 - Koreksi Penyesuaian Persediaan namun tidak termasuk koreksi penyesuaian persediaan bahan untuk pemeliharaan dan barang yg akan Diserahkan pada Masyarakat sebesar Rp193.080.278,- (faktor penambah beban persediaan yang tersaji di Laporan Operasional)
 - Belanja Barang Persediaan (521811) yang dipakai untuk Bahan Persediaan Pemeliharaan dan yg akan diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp445.564.740,- (faktor pengurang beban persediaan yang tersaji di Laporan Operasional)

Beban Barang dan Jasa
Rp343.797.915.573,-

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp343.797.915.573,-** dan **Rp314.231.819.382,-**. Beban Barang dan Jasa adalah beban konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 65
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 4,048,777,497	Rp 6,186,727,434	(34.56)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 17,415,000	Rp 16,155,000	7.80
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 846,840,000	Rp 923,889,000	(8.34)
Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 10,287,655,952	Rp 12,282,031,536	(16.24)
Beban Bahan	Rp 10,386,555,880	Rp 10,248,813,805	1.34
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 52,864,782,100	Rp 51,594,360,425	2.46
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 180,772,495,302	Rp 154,151,643,630	17.27

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	Rp 2,714,937,283	Rp 2,732,668,847	(0.65)
Beban Langganan Telepon	Rp 566,633,626	Rp 647,389,492	(12.47)
Beban Langganan Air	Rp 338,961,412	Rp 330,534,462	2.55
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 36,163,761	Rp -	-
Beban Jasa Konsultan	Rp 533,922,500	Rp 430,899,500	23.91
Beban Sewa	Rp 10,746,369,896	Rp 9,428,932,023	13.97
Beban Jasa Profesi	Rp 66,918,040,000	Rp 64,235,666,440	4.18
Beban Jasa Lainnya	Rp 2,708,278,364	Rp 1,006,968,488	168.95
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp 10,087,000	Rp 15,139,300	(33.37)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	Rp 343,797,915,573	Rp314,231,819,382	9.41

Beban Barang dan Jasa (LO) seharusnya sama dengan Belanja Barang dan Jasa (LRA) selain belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat ditambah Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Barang dan Jasa Akhir Tahun dikurangi Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Barang dan Jasa Awal Tahun dikurangi pengembalian Belanja Barang dan Jasa yang disetorkan di tahun berikutnya. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Beban Barang dan Jasa (LO)	Rp 343,797,915,573
b	Belanja Barang dan Jasa selain belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat TA 2017 (LRA)	Rp 346,276,268,455
c	Belanja Barang dan Jasa yang masih harus dibayar Akhir Tahun	Rp 272,394,083
d	Belanja Barang dan Jasa yang masih harus dibayar Awal Tahun	Rp 263,553,589
e	Pengembalian Belanja Barang dan Jasa Tahun Berikutnya	Rp -
f	Jumlah (b+c-d-e)	Rp 346,285,108,949
	Selisih persamaan Beban Barang dan Jasa (a-f)	Rp (2,487,193,376)

Selisih persamaan Beban Barang dan Jasa yang tersaji di Laporan Operasional TA 2017 dengan Belanja Barang dan Jasa yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 sebesar Rp2.487.193.376,- tersebut berasal dari :

- Pembelian Buku yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp96.000.000,- menggunakan akun 521219. (faktor pengurang Beban Barang dan Jasa yang tersaji di Laporan Operasional)
- Hasil opname fisik pada akhir tahun 2017 yang menambah saldo barang persediaan sebesar Rp11.302.500,- yang pengadaannya menggunakan akun 521219 (faktor pengurang Beban Barang atau Jasa yang tersaji di Laporan Operasional).
- Pembelian Persediaan Bahan Konsumsi senilai Rp2.379.890.876,- dengan menggunakan akun 521211 (faktor pengurang Beban Barang atau Jasa yang tersaji di Laporan Operasional).

**Beban Pemeliharaan
Rp16.489.583.702,-**

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Beban Pemeliharaan yang disebabkan koreksi kurang Beban Pemeliharaan sebesar Rp34.878.140,- karena adanya pengadaan Tahun Anggaran 2017 yang menghasilkan Peralatan dan Mesin berupa 2 (dua) buah lemari kayu namun menggunakan belanja mata anggaran 523111, dalam Laporan Keuangan MPR RI Tahun Anggaran 2017 *Unaudited* masih menyajikan nilai sebesar Rp34.878.140,- tersebut sebagai Beban Pemeliharaan.

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp16.489.583.702,-** dan **Rp15.709.824.294,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada tabel 66.

Tabel 66
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 5,733,070,662	Rp 5,651,180,438	1.45
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 1,367,151,801	Rp 1,381,486,480	(1.04)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 6,520,818,839	Rp 7,266,962,053	(10.27)
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp 2,336,458,617	Rp 898,190,000	160.13
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 527,133,783	Rp 512,005,323	2.95
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp 4,950,000	Rp -	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	Rp 16,489,583,702	Rp 15,709,824,294	4.96

Beban Pemeliharaan (LO) seharusnya sama dengan Belanja Barang/Jasa untuk Pemeliharaan ditambah Persediaan Awal Tahun untuk Pemeliharaan dikurangi Persediaan Akhir Tahun untuk Pemeliharaan ditambah Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Pemeliharaan Akhir Tahun dikurangi Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Pemeliharaan Awal Tahun. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Beban Pemeliharaan (LO)	Rp 16,489,583,702
b	Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan TA 2017 (LRA)	Rp 16,204,055,509
c	Persediaan Barang untuk Pemeliharaan Awal tahun 2017	Rp 58,807,961
d	Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Pemeliharaan Akhir Tahun 2017	Rp -
e	Persediaan Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Akhir Tahun 2017	Rp 68,921,768
f	Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk Pemeliharaan Awal Tahun 2017	Rp -
g	Jumlah (c+b+d-e-f)	Rp 16,193,941,702
	Selisih persamaan Beban Pemeliharaan (a-g)	Rp 295,642,000

Selisih persamaan Beban Pemeliharaan yang tersaji di Laporan Operasional TA 2017 dengan Belanja Pemeliharaan yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 sebesar Rp295.642.000,- tersebut berasal dari :

- Terdapat Belanja Pemeliharaan (5231) yang dikapitalisasi menjadi Peralatan dan Mesin senilai Rp153.721.590,- (faktor pengurang beban pemeliharaan yang tersaji di Laporan Operasional)

- Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp1.000,- (faktor pengurang beban pemeliharaan yang tersaji di Laporan Operasional)
- Koreksi Penyesuaian Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp3.798.850,- (faktor penambah beban persediaan yang tersaji di Laporan Operasional)
- Belanja Barang Persediaan (521811) yang dipakai untuk Bahan Persediaan Pemeliharaan sebesar Rp445.565.740,- (faktor penambah beban pemeliharaan yang tersaji di Laporan Operasional)

Beban Perjalanan Dinas
Rp315.661.184.182,-

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Beban Perjalanan Dinas yang disebabkan oleh koreksi pengurangan beban perjalanan dinas sebesar Rp80.554.400,- karena adanya pengembalian belanja perjalanan dinas yang semula diakui sebagai pendapatan kegiatan non operasional sehingga mengakibatkan lebih catat beban perjalanan dinas yang tersaji pada Laporan Keuangan MPR RI TA 2017 *Unaudited*.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp315.661.184.182,-** dan **Rp296.886.436.401,-**. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada tabel 67.

Tabel 67
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 133,304,572,446	Rp 129,988,750,952	2.55
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1,719,035,000	Rp 1,529,180,000	12.42
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 141,875,573,900	Rp 121,540,969,050	16.73
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 7,029,279,900	Rp 5,602,179,000	25.47
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	Rp 693,176,320	Rp 37,703,880	1,738.47
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	Rp 31,039,546,616	Rp 38,187,653,519	(18.72)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	Rp 315,661,184,182	Rp 296,886,436,401	6.32

Beban Perjalanan Dinas (LO) seharusnya sama dengan Belanja Barang/Jasa untuk perjalanan dinas (LRA) ditambah Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk perjalanan dinas Akhir Tahun dikurangi Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk perjalanan dinas Awal Tahun dikurangi pengembalian Belanja Perjalanan Dinas yang disetorkan di tahun berikutnya. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Beban Perjalanan Dinas (LO)	Rp 315,661,184,182
b	Belanja Barang/Jasa untuk Perjalanan Dinas TA 2017 (LRA)	Rp 315,741,738,582
c	Hutang Belanja Perjalanan Dinas Akhir Tahun	Rp -
d	Hutang Belanja Perjalanan Dinas Awal Tahun	Rp -
e	Pengembalian Belanja Perjalan Dinas Tahun Berikutnya	Rp 80,554,400
f	Jumlah (b+c-d-e)	Rp 315,661,184,182
Selisih persamaan Beban Perjalanan Dinas (a-f)		Rp -

Tidak terdapat selisih persamaan Belanja Perjalanan Dinas yang tersaji pada Laporan Operasional TA 2017 dengan Belanja Pegawai yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2017.

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

**Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp228.958.730,-**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp228.958.730,-** dan **Rp3.366.919.787,-**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan bagian dari program sosialisasi Ketetapan MPR, Pancasila, UUD NRI Tahun1945, NKRI

dan Bhineka Tunggal Ika. Barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat itu berupa Buku Saku UUD 1945, plakat-plakat, tas sosialisasi, tas ransel untuk keperluan sosialisasi dan seminar, kaos dan celana training sosialisasi, topi sosialisasi dan jaket sosialisasi. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada tabel 68.

Tabel 68
Perbandingan Rincian Beban yang Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	Rp 228,958,730	Rp 3,366,919,787	(93.20)
Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 228,958,730	Rp3,366,919,787	(93.20)

Beban Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (LO) seharusnya sama dengan Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat ditambah Persediaan Awal Tahun untuk diserahkan kepada masyarakat dikurangi Persediaan Akhir Tahun untuk diserahkan kepada masyarakat ditambah Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat Akhir Tahun dikurangi Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat Awal Tahun. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 228,958,730
b	Belanja Barang/Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 (LRA)	Rp -
c	Persediaan Barang untuk untuk Diserahkan kepada Masyarakat Awal tahun 2017	Rp 254,948,980
d	Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat Akhir	Rp -
e	Persediaan Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Akhir Tahun 2017	Rp 25,990,250
f	Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat Awal	Rp -
g	Jumlah (c+b+d-e-f)	Rp 228,958,730
	Selisih persamaan Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (a-g)	Rp -

Terdapat Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sejumlah Rp228.958.730,-, namun tidak terdapat realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kesalahan kodefikasi Barang Persediaan pada saat input pembelian barang persediaan pada beberapa tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Seharusnya persediaan tersebut dicatat sebagai Bahan Konsumsi namun diinput sebagai Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. Sehingga beban ini tetap akan muncul jika persediaan yang tercatat sebagai Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat tersebut digunakan, sampai pada akhirnya persediaan tersebut habis digunakan.

Beban penyusutan dan Amortisasi
Rp18.041.736.197,-

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK serta koreksi pembatalan Revaluasi Aset Tetap TA 2017 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2017 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*Audited*) Nomor NKF.001/01/R/PB.6/2018 terdapat koreksi nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi yang disebabkan oleh koreksi kurang beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp940.618.151,-. Koreksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Koreksi kurang Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 82.915.776,-, disebabkan proses reklasifikasi keluar karena koreksi kesalahan kodefikasi Peralatan dan Mesin yang tersaji pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*.
- Koreksi tambah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 92.255.377,-, disebabkan proses reklasifikasi masuk karena koreksi kesalahan kodefikasi Peralatan dan Mesin yang tersaji pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*.
- Koreksi kurang Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.155.688,- karena kesalahan pencatatan baterai kamera dan baterai handycam sebagai Aset Peralatan dan Mesin pada Laporan

- Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*, seharusnya bukan sebagai Peralatan dan Mesin.
- Koreksi tambah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.487.814,- karena koreksi penambahan aset tetap peralatan dan mesin karena adanya pengadaan TA 2017 yang menghasilkan aset tetap peralatan dan mesin berupa dua buah lemari kayu namun bukan dari belanja modal, dan aset tersebut belum tercatat dalam Laporan Barang Pengguna TA 2017 *Unaudited*.
 - Koreksi tambah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp752.710,- karena penyesuaian atas beban penyusutan TA 2017 yang seharusnya menjadi beban penyusutan di TA 2016
 - Koreksi pembatalan Revaluasi Gedung dan Bangunan yang mengakibatkan berkurangnya Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp953.042.588,-. Koreksi dilakukan melalui jurnal umum SAIBA Satuan kerja Konsolidasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3507/PB.6/2017 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Revaluasi BMN Tahun 2017.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp18.041.736.197,-** dan **Rp18.464.479.087,-**. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada tabel 69.

Tabel 69
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 11,402,262,218	Rp12,031,215,876	(5.23)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 6,154,041,153	Rp6,047,282,664	1.77
Beban Penyusutan Jaringan	Rp 352,415,756	Rp353,217,581	(0.23)
Jumlah Penyusutan Aset Tetap	Rp 17,908,719,127	Rp 18,431,716,121	(2.84)
Beban Amortisasi Software	Rp 132,933,750	Rp32,683,750	307
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 83,320	Rp79,216	5.18
Jumlah Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	Rp 133,017,070	Rp 32,762,966	306.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 18,041,736,197	Rp 18,464,479,087	(2.29)

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	Rp 18,041,736,197
b	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Akhir Tahun	Rp 173,035,543,611
c	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Awal Tahun	Rp 154,994,725,124
d	Jumlah (b-c)	Rp 18,040,818,487
	Selisih persamaan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (a-d)	Rp 917,710

Selisih persamaan Beban Penyusutan yang tersaji di Laporan Operasional TA 2017 dengan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 sebesar Rp44.126.966.995,- tersebut berasal dari :

- Terdapat penilaian kembali Aset Tetap yang mengakibatkan berkurangnya nilai Gedung dan Bangunan, hal ini menyebabkan berkurangnya Akumulasi Penyusutan sebesar Rp44.126.049.285,-
- Koreksi mutasi tambah karena pembatalan kembali penilaian kembali Aset Tetap yang menyebabkan bertambahnya kembali Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Neraca Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat TA 2017 Audited sebesar Rp44.126.049.285 sebagai kontra akun dari Revaluasi Aset Tetap.

- Koreksi mutasi kurang pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp165.000,- karena perbaikan sistem aplikasi BMN. Terjadi salah saji kelebihan beban penyusutan serta akumulasi penyusutan sebesar Rp165.000,- pada Lapoaran Keuangan TA 2017 Unaudited yang disebabkan oleh kesalahan sistem aplikasi SIMAK BMN.
- Koreksi mutasi kurang pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp752.710,- yang disebabkan oleh reklasifikasi Peralatan dan Mesin yang sejak Tahun 2016 salah catat kodefikasinya.

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

**Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp2.198.353,-**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar **Rp2.198.353,-** dan **Rp45.455,-**. Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2017 dan TA 2016 disajikan pada tabel 70.

Tabel 70
Rincian Beban Penyisihan Piutang
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	(Rp45,455)	Rp45,455	(200.00)
Beban Penyisihan Bagian Lancar - Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	Rp1,701,805	Rp0	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	Rp542,003	Rp0	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp2,198,353	Rp45,455	4,736.33

Beban Penyisihan Piutang (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyisihan Piutang Akhir Tahun dikurangi saldo Akumulasi Penyisihan Awal Tahun ditambah/dikurangi penyesuaian. Persamaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Beban Penyisihan Piutang (LO)	Rp 2,198,353
b	Akumulasi Penyisihan Piutang Akhir Tahun	Rp 2,243,808
c	Akumulasi Penyisihan Piutang Awal Tahun	Rp 45,455
d	Jumlah (b-c)	Rp 2,198,353
Selisih persamaan Beban Beban Penyusutan dengan Akumulasi Penyusutan (a-d)		Rp -

Tidak terdapat selisih persamaan antara Beban Penyisihan Piutang TA 2017 dengan Akumulasi Penyisihan Piutang Akhir TA 2017 dikurangi Akumulasi Penyisihan Piutang Awal TA 2017.

D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp1.519.903.796,-

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.519.903.796,- dan Rp3.201.314.352,-.

Tabel 71
Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional
TA 2017 Audited dan TA 2016 Audited

URAIAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp 100,159,000	(100.00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa penjualan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 100,159,000	(100.00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp100,159,000	(1.00)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 1,579,866,259	Rp 3,132,922,288	(49.57)
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	Rp 942,500,730	Rp0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 15,112,680	Rp97,914,752	(84.57)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 365,411,258	Rp2,988,161,934	(87.77)
Pendapatan penyesuaian Nilai Persediaan	Rp 256,841,591	Rp 46,845,602	448.27

URAIAN	TA 2017 Audited	TA 2016 Audited	NAIK (TURUN) %
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 59,962,463	Rp 31,766,936	88.76
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp 59,962,463	Rp 31,766,936	88.76
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 1,519,903,796	Rp 3,101,155,352	(50.99)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp 1,519,903,796	Rp 3,201,314,352	(0.53)

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional tersaji dalam tabel berikut :

Rincian	Jumlah	Keterangan
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	Rp 942,500,730	Pengakuan Piutang TP/TGR berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 123A Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 72A22 Tahun 2017 tentang Biaya Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai Pemerintah Non Pegawai negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015 tanggal 18 Mei 2018.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 15,112,680	Rincian tersaji pada lampiran
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 365,411,258	Rincian tersaji pada lampiran
Pendapatan penyesuaian Nilai Persediaan	Rp 256,841,591	Rincian tersaji pada lampiran
Jumlah	Rp 1,579,866,259	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp629.350.597.804

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 adalah masing-masing sebesar Rp629.350.597.804,- dan Rp395.087.857.991,-

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus(defisit) LO
Rp(811.449.529.829),-

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah defisit sebesar Rp(811.449.529.829),- dan Rp(743.418.206.852),-.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp8.327.790,-

Koreksi yang menambah /mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp8.327.790,- dan Rp245.222.444.539,-

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 *Audited* adalah Rp0,- dan Rp24.878.442,-

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Revaluasi aset tetap yang sudah dilakukan hingga akhir periode 31 Desember 2017 tidak disajikan dalam *face* LKKL tahun 2017. Hal ini sesuai dengan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-3383/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.3.3 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp8.327.790,-*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp(8.327.790),- dan Rp245.197.566.097,- Koreksi ini dapat dirinci sebagai berikut:

No	Transaksi	Nilai Koreksi
1	Koreksi tambah yang disebabkan oleh penyesuaian atas beban penyusutan TA 2017 yang seharusnya menjadi beban di TA 2016	752.710
2	Koreksi tambah yang disebabkan oleh kesalahan sistem aplikasi SIMAK BMN sehingga pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 <i>Unaudited</i> terdapat kelebihan salah saji beban penyusutan peralatan dan mesin	165.000
3	Koreksi kurang yang disebabkan terdapat kesalahan pencatatan baterai yang seharusnya menjadi barang persediaan namun pada Laporan Barang Pengguna TA 2017 <i>Unaudited</i> dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin	(9.245.500)
Total		(8.327.790)

E.3.4 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
Rp0,-*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp0,- dan Rp0,-

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar
Entitas
Rp810.402.447.933,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp810.402.447.933,- dan Rp732.458.502.126,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Rp1.306.475.642.432

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp814.472.209.760,- sedangkan DKEL sebesar Rp4.069.761.827,-

Tabel 72
Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	814.472.209.760
Diterima dari Entitas Lain	(4.069.761.827)
Jumlah	810.402.447.933

E.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp628.295.188.118

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2017 *Audited* dan 2016 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp628.295.188.118,- dan Rp629.350.597.804,-.

Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. ASET BERSEJARAH

MPR RI mencatat aset bersejarah berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sebanyak 1 unit. Gedung tersebut adalah Gedung Merdeka yang terletak di Bandung, Jawa Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gedung tersebut dimiliki oleh MPR RI. Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.

F.2. REKENING PEMERINTAH

MPR sebagai lembaga negara mempunyai dua rekening yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan yaitu:

1. Nomor rekening 1020000021060 atas nama Bendahara Pengeluaran Majelis MPR RI di Bank Mandiri Cabang Pembantu DPR RI.
2. Nomor rekening 1220006316668 atas nama Bendahara Pengeluaran Setjen MPR RI di Bank Mandiri Cabang Pembantu DPR RI.

Daftar rekening MPR dapat dilihat pada Laporan Rekening Pemerintah terlampir.

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT ASET TETAP

Terdapat aset Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda 4 yang terdiri atas Sedan Toyota Corolla nomor polisi B 2232 LQ sebanyak 1 (satu) unit dan Jeep Ford Escape nomor polisi B 1518 GQ sebanyak 1 (satu) unit yang sudah tidak tersaji di Neraca Laporan Keuangan MPR RI TA 2016 *Audited* namun masih dalam penguasaan MPR karena aset tersebut sudah diusulkan penghapusannya serta

telah mengalami proses lelang namun tidak terdapat penawar atas 2 (dua) aset tersebut. Pada bulan November 2017 telah diusulkan kembali proses penilaian ulang kembali.

Terdapat 1 (satu) unit bangunan gedung (Gedung MPR/DPD RI) senilai Rp101.990.281.972,- yang tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Sekretariat Jenderal MPR RI yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagai kantor Sekretariat Jenderal DPD RI.

F.3.2. PENGUNGKAPAN TERKAIT REALISASI BELANJA

Terdapat perbedaan nilai realisasi belanja bruto antara Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian negara/lembaga dengan nilai realisasi belanja yang terdapat pada lampiran Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja Majelis (000021) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII sebesar Rp1.301.400.500,- yang disebabkan oleh transaksi pemulihan PAGU dari Surat Setoran Pengembalian Belanja.

F.3.2. PENGUNGKAPAN TERKAIT MASALAH PADA APLIKASI E-REKON TINGKAT LEMBAGA

Pada Laporan Keuangan tingkat lembaga ini kami lampirkan pula Laporan Barang Pengguna output dari SIMAK BMN karena Laporan Barang Pengguna output dari E-Rekon tidak tersaji dengan benar. Terdapat masalah-masalah sebagai berikut:

- Saldo Awal tidak dapat dibuka pada aplikasi E-Rekon tingkat Lembaga
- Nilai mutasi tambah dan mutasi kurang yang terbalik pada Laporan Barang Pengguna Intrakomtabel
- Nilai yang tersaji pada Laporan penyusutan Intrakomptabel salah.
- Laporan Barang Bersejarah kuantitasnya tidak sesuai

F.3.3. PENGUNGKAPAN TERKAIT REVALUASI ASET TETAP

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman pelaksanaan Penilaian kembali Barang Milik Negara , telah dilakukan Revaluasi terhadap sebagian objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Revaluasi atas Tanah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp584.267.459.395,- yang terdapat pada entitas Sekretariat Jenderal.
2. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp3.415.603.778 yang terdapat pada entitas Sekretariat Jenderal.

Hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan keuangan setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali.

LAMPIRAN A1

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 (Audited)

No	Jenis Aset	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	PERALATAN DAN MESIN		148,831,544,599	120,071,320,509	28,760,224,090
1	Alat Besar Darat	10	1,322,136,200	1,318,390,040	3,746,160
2	Alat bantu	7	6,839,779,790	6,315,071,287	524,708,503
3	Alat Angkutan darat Bermotor	7	16,697,138,850	10,454,382,727	6,242,756,123
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	199,452,000	199,452,000	-
5	Alat Bengkel Bermesin	10	72,215,000	29,491,218	42,723,782
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	86,679,450	74,862,975	11,816,475
7	Alat Ukur	5	117,377,920	112,757,920	4,620,000
8	Alat Kantor	5	16,398,535,209	14,514,382,947	1,884,152,262
9	Alat Rumah Tangga	5	32,499,427,246	28,062,303,782	4,437,123,464
10	Alat Studio	5	44,336,429,890	33,163,089,315	11,173,340,575
11	Alat Komunikasi	5	5,002,019,937	4,722,431,368	279,588,569
12	Peralatan Pemancar	10	972,932,740	737,096,354	235,836,386
13	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	319,984,500	74,663,046	245,321,454
14	Alat Kedokteran	5	2,600,968,720	2,023,745,370	577,223,350
15	Alat Kesehatan Umum	5	21,986,674	8,275,684	13,710,990
16	Unit Alat Laboratorium	8	473,962,060	284,691,592	189,270,468
17	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15	158,620,000	49,125,994	109,494,006
18	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	3,522,530	1,580,990	1,941,540
19	Komputer Unit	4	14,177,628,603	12,816,942,850	1,360,685,753
20	Peralatan Komputer	4	6,197,646,314	4,808,249,250	1,389,397,064
21	Alat SAR	2	7,436,000	5,777,750	1,658,250
22	Unit Peralatan Proses Produksi	8	51,969,500	48,287,250	3,682,250
23	Peralatan Olah Raga	3	273,695,466	246,268,800	27,426,666
B	GEDUNG DAN BANGUNAN		207,005,054,808	47,218,863,812	159,786,190,996
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	201,854,562,425	46,697,642,783	155,156,919,642
2	Bangunan Gedung tempat Tinggal	50	5,115,401,383	517,095,739	4,598,305,644
3	Tugu/Tanda Batas	50	35,091,000	4,125,290	30,965,710
C	JALAN IRIGASI, DAN JARINGAN		13,646,277,700	3,200,892,824	10,445,384,876
1	Instalasi Pembangkit Listrik	40	10,660,860,700	2,489,641,232	8,171,219,468
2	Jaringan Listrik	40	2,985,417,000	711,251,592	2,274,165,408
D	ASET TETAP DALAM RENOVASI		60,665,802,705	-	60,665,802,705
1	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi		504,375,850	-	504,375,850
2	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi		60,161,426,855	-	60,161,426,855
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP			430,148,679,812	170,491,077,145	259,657,602,667
A	ASET TAK BERWUJUD		2,048,944,540	1,260,756,045	788,188,495
1	Software		1,991,222,920	1,260,756,045	730,466,875
2	Aset Tak berwujud Lainnya		57,721,620	-	57,721,620
B	ASET LAIN-LAIN		1,283,835,400	1,283,710,421	124,979
1	Alat Rumah Tangga		1,283,099,000	1,283,099,000	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		736,400	611,421	124,979
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA			3,332,779,940	2,544,466,466	788,313,474
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA			433,481,459,752	173,035,543,611	260,445,916,141



SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas di Bendahara Pengeluaran

Bagian Anggaran : 001

Majelis Permusyawaratan Rakyat

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 31 Desember 2017				Keterangan
			Tunai	Saldo Bank		Total	
				Saldo	Bank dan No.Rek		
1	000017	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	122-00-0631666-8	Rp -	
2	000021	Majelis	Rp 4,394,113	Rp -	102-00-0002106-0	Rp 4,394,113	
Jumlah			Rp 4,394,113	Rp -		Rp 4,394,113	

Kas Lainnya dan Setara Kas

Bagian Anggaran : 001

Majelis Permusyawaratan Rakyat

No	Kode Satker	Nama Satker	Saldo per 31 Desember 2017				Keterangan
			Tunai	Saldo Bank		Total	
				Saldo	Bank dan No.Rek		
1	000017	Sekretariat Jenderal	Rp 133,611,474	Rp -	122-00-0631666-8	Rp 133,611,474	
2	000021	Majelis	Rp 133,856,774	Rp -	102-00-0002106-0	Rp 133,856,774	
Jumlah			Rp 267,468,248	Rp -		Rp 267,468,248	